

Studi mengenai Polarisasi dan Pengembangan Narasi Alternatif dalam Isu Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia



Nur Rafiza Putri
Indrawan Prasetyo
Afra Suci Ramadhon
Ardhitya Eduard Yeremia
Inaya Rakhmani

Studi mengenai Polarisasi dan Pengembangan Narasi Alternatif dalam Isu Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

Tim Penulis:

Nur Rafiza Putri
Indrawan Prasetyo
Afra Suci Ramadhon
Ardhitya Eduard Yeremia
Inaya Rakhmani

Tim Peninjau:

Agung Budiono
Sholahudin Al Ayubi
Intan Fatma Dewi
Rosa Vania Setowati

Pengolah Data Media Sosial:

Purnama Alamsyah

Penyunting Ahli:

Dr. Rini Astuti

**Diterbitkan di Indonesia pada tahun 2023
oleh Asia Research Centre, Universitas Indonesia**

Ruang Cendekia Multiguna Jakob Oetama
Gedung H, Kampus Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
Depok, Jawa Barat 16424
Indonesia
arc.ui.ac.id

Bekerja Sama dengan:

Yayasan Indonesia Cerah (CERAH)

Desain:

CIPSI (<https://www.cipsi.xyz/>)

Hak Cipta:

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam laporan ini dilisensikan di bawah Lisensi CC BY-NC-ND 4.0



Ringkasan Eksekutif



Dalam dua abad terakhir, kenaikan temperatur muka bumi yang konsisten telah menjadi perhatian global dan mendorong kerja sama antar-negara dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil (energi kotor). Transisi energi berkeadilan, yang memperhitungkan dampak lingkungan dan socio-ekonomi, telah menjadi salah satu prioritas utama pemimpin dunia dalam upaya pengurangan ini. Sebagai respons terhadap perubahan iklim dan juga tekanan internasional, negara-negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk beralih dari energi kotor ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Namun, prevalensi energi kotor masih mendominasi bauran energi, di antaranya, menurut kajian kami, karena kepentingan oligarki energi, dan politik subsidi serta harga energi.

Asia Research Centre, Universitas Indonesia (ARC UI) bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) melakukan studi mengenai Polarisasi dan Pengembangan Narasi Alternatif dalam Isu Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia.

Studi ini berusaha untuk melihat bagaimana polarisasi isu transisi energi bergulir di media sosial, khususnya di antara kelompok non-elite sebagai mayoritas warga yang terdampak energi kotor. Kami mengkaji persepsi terhadap isu transisi energi, dan berharap hasil studi ini dapat menjadi basis untuk mengembangkan narasi alternatif berdasarkan temuan yang kami sarikan. Oleh sebab itu, kami berfokus pada persepsi dan posisi berbagai pihak lintas sektor: swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan jurnalis).

Kami juga mengeksplorasi pemahaman dan persepsi orang muda, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang menurut kami kunci, terhadap isu transisi energi. Temuan kami kombinasi dengan aspirasi dan kecemasan orang muda sebagai pengambil kebijakan pengurangan konsumsi energi kotor keseharian dan warga partisipatif pada periode setelah penerapan kebijakan transisi energi berkeadilan dijalankan (di antaranya, *net zero emission* yang secara umum diharapkan terwujud pada 2050).



Temuan Kunci 1

Analisis jejaring pada media sosial yang kami lakukan menunjukkan ada tiga rumpun percakapan yang dominan. Yang pertama dipengaruhi oleh akun-akun media sosial yang berafiliasi dengan perusahaan negara penyedia listrik (PT PLN). Rumpun kedua dipengaruhi oleh akun-akun tokoh publik dan institusi internasional dalam transisi energi (JETP). Rumpun ketiga dipengaruhi oleh organisasi masyarakat sipil internasional, nasional dan lokal yang bertautan dengan gerakan transisi energi berkeadilan.



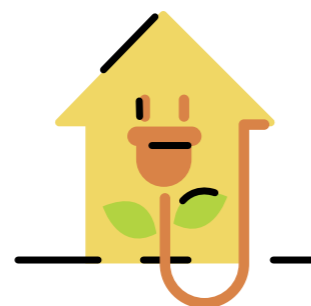
Temuan Kunci 2

Diskusi media sosial di Indonesia tentang transisi energi sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan keputusan transnasional (kesepakatan antar-negara mengenai arah kebijakan transisi energi berkeadilan). Diskusi transisi energi berkeadilan di media sosial Indonesia lebih didorong oleh kesepakatan internasional dan partisipasi pemimpin lokal daripada polarisasi internal. Bagi kami, ini menandakan absennya dinamika nasional dan kurangnya kapasitas aktor lokal untuk mempertahankan perhatian publik terhadap isu kebijakan tersebut.



Temuan Kunci 3

Ada dua hal yang kami temukan dari eksplorasi terhadap pandangan orang muda terhadap isu transisi energi. Pertama, kecemasan mengenai masa depan energi bersih belum diekspresikan secara politis ataupun tersasar pada kebijakan yang sesuai. Yang kedua, kecemasan ini juga berpusat pada isu polusi udara dan kendaraan listrik; yang berarti imajinasi masa depan orang muda terbatas pada konsumsi sehari-hari dalam, secara kasar, 1-5 tahun ketimbang beberapa dekade ke depan.



Temuan Kunci 4

Melalui riset aksi berupa *focus group discussion*, kami menemukan bahwa para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur–kawasan industri ekstraktif–dan Cirebon–daerah tempat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan dipensiunkan–telah memiliki gambaran tentang karakteristik transisi energi yang ideal. Menurut mereka, transisi energi harus berkeadilan, melibatkan masyarakat, terjangkau, dan ramah lingkungan. Namun, mereka menaruh perhatian pada beberapa tantangan implementasi



agenda transisi energi di tingkat daerah. Tantangan-tantangan tersebut meliputi: (1) konflik kewenangan pemerintah pusat dan daerah; (2) minimnya pelibatan masyarakat; (3) transparansi pendanaan; serta (4) potensi korupsi. Dari riset aksi, kami juga menemukan bahwa pemerintah bukanlah aktor yang monolitik. Sejumlah pejabat memiliki pandangan kritis terhadap ekstraksi energi kotor, terutama batubara. Interaksi dengan mereka perlu terus dijalin dalam rangka memperkuat dorongan bagi implementasi agenda transisi energi.

Rekomendasi Komunikasi Strategis

Berdasarkan empat temuan kunci ini, dan memperhatikan karakteristik studi yang berfokus pada narasi media sosial, kami berargumen bahwa orang muda (17-30 tahun, tinggal di wilayah urban di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, serta ada pada kelas menengah), sebagai pengguna teknologi digital mayoritas di Indonesia, adalah aktor strategis dalam narasi transisi energi berkeadilan di media sosial. Mereka membutuhkan paparan dan diberi peran sentral untuk membangun agenda transisi energi berkeadilan yang lebih partisipatif. Namun di saat yang sama, perhatian khusus pada karakteristik

orang muda ini perlu dibarengi dengan pelibatan pemangku kepentingan kelompok usia lain dan pengguna media sosial di wilayah rural dan di daerah Indonesia Timur, sehingga memperkuat narasi transisi energi berkeadilan dan juga bersifat inklusif secara sosial.

Dalam konteks pengguna media sosial urban, *trending issues* seperti polusi yang meningkat serta advokasi PT PLN untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai solusi di wilayah urban dapat digunakan sebagai momen untuk mengungkap sumber energi dari baterai yang menggerakkan kendaraan listrik. Pemangku kepentingan aktor akademik dan ilmu pengetahuan dapat berkolaborasi dengan aktor organisasi masyarakat sipil dan jurnalisme sains untuk meningkatkan pengetahuan mengenai energi kotor dan energi bersih, serta solusi material yang perlu diambil menurut orang muda. Strategi ini dapat diterapkan dalam pengembangan narasi alternatif yang lebih partisipatif, melalui bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pengetahuan yang memperhatikan isu orang muda serta secara reguler dan konstan menjalankan advokasi.

Daftar Isi

	Ringkasan Eksekutif	III
	Daftar Isi	VII
Pendahuluan		
	Tujuan	3
	Metode	4
	Kajian literatur	5
	Gambaran Umum Isu Transisi Energi di Indonesia	7
Temuan		
	Polarisasi Isu: Eksplorasi terhadap #transisienergi pada Media Sosial Twitter	10
	Persepsi Orang Muda terhadap terhadap Isu Transisi Energi	18
	Pengembangan Narasi Alternatif melalui Praktik Riset Aksi	23
	Gambaran Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan	28
	Kesimpulan dan Rekomendasi	46
	Referensi	47



01.

Pendahuluan

Di seluruh dunia dan juga di Indonesia, kenaikan temperatur muka bumi yang konsisten selama dua abad terakhir mendorong pemerintah untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (IPCC, 2023). Salah satu prioritas dalam kerja sama antar-negara ini adalah pengurangan pemakaian energi bahan bakar fosil atau energi kotor (IPCC, 2023). Kemitraan antara negara-negara dengan ekonomi mapan dengan negara-negara ekonomi berkembang memiliki fokus untuk mengawal pengurangan pemakaian energi kotor dengan memperhatikan dampak lingkungannya tapi juga sosio-ekonomi (Kusuma, 2023); yang semakin populer disebut sebagai transisi energi berkeadilan (*just energy transition*; lihat JETP).

Upaya pemerintah yang berkomitmen dalam agenda transisi energi berkeadilan dapat diamati melalui pembentukan kebijakan (Perdana, 2023). Di Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan demokrasi terbesar ketiga di dunia (Maurer, 2021), ada peningkatan pengeluaran kebijakan yang dilakukan oleh kementerian Energi, Sumberdaya, dan Mineral (ESDM) dan juga perusahaan negara yang mengurus penyediaan listrik (PLN, 2023). Di saat yang sama, studi menunjukkan bahwa sektor energi kotor dikuasai oleh pemegang modal besar (Traction Energy Asia, 2020).

Kondisi-kondisi di atas menimbulkan kontradiksi dalam kebijakan pemerintah Indonesia terkait transisi energi (Ordenez dkk, 2022; Wijaya, 2022). Pada satu sisi, pemerintah mengadopsi retorika 'hijau'

dalam kebijakan serta menyatakan komitmen untuk mengatasi pemanasan global dalam rangka merespon tekanan internasional dan dorongan domestik untuk memitigasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pada 2016, sebagai contoh, Indonesia menandatangani Kesepakatan Paris (Paris Agreement), dan menargetkan pada 2030 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan teknis dan pendanaan internasional. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional 2017, pemerintah menargetkan bahwa pada 2025, 23 persen dari total pasokan energi di Indonesia berasal dari sumber-sumber energi terbarukan. Di sisi lain, prevalensi energi kotor nampak dibiarkan terus-menerus terjaga demi memastikan keberlangsungan pembangunan nasional, rendahnya tarif listrik, dan amannya pasar bagi industri batu bara membuat prevalensi energi kotor terus-menerus terjaga (Ordenez dkk, 2021).

Salah satu cara untuk mengidentifikasi kepentingan ekonomi dan politik, terutama dalam kaitannya dengan partisipasi publik adalah dengan melakukan observasi pada narasi isu transisi energi pada media sosial. Media sosial merupakan arena politik di mana pemegang kepentingan dari berbagai sektor, pemerintah, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan juga perusahaan, dapat berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat mengenai isu transisi energi (Li dkk, 2019; Loureiro dan Allo, 2020). Di saat yang sama, media sosial sebagai arena politik juga dipadati oleh *buzzer*, aktor yang

¹ Just Energy Transition partnership adalah kemitraan antara Indonesia dan International Partnership Group (dipimpin oleh Amerika Serikat) yang bertujuan mempercepat transisi energi Indonesia ke sumber yang lebih bersih, dengan target mengurangi emisi sektor listrik dan meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 34% pada 2030.

dibayar untuk membangun isu secara strategis (Camil, Attamimi, dan Esti, 2017) sebagai bagian dari industri kampanye politik (Rakhmani dan Saraswati, 2021). Aktor kampanye politik dapat berpihak pada elite maupun masyarakat sipil, maupun memiliki posisi pro- atau kontra- terhadap transisi energi berkeadilan.

Berbagai riset mengenai media sosial sebagai arena politik menunjukkan bahwa ada kecenderungan pengelompokan pendapat seragam untuk isu-isu politik yang kemudian berseteru satu sama lainnya; atau polarisasi. Polarisasi isu di media sosial terjadi di negara mapan seperti Amerika Serikat (Jeong & Lowry, 2021) dan Jerman (Zilles & Marg, 2022), tetapi juga negara berkembang seperti Afrika Selatan (Mare, Mabweazara, Moyo 2020) dan Indonesia (Lim, 2017). Sebabnya, menurut berbagai sarjana, adalah kecenderungan algoritma media sosial untuk melakukan monetisasi terhadap keterlibatan pengguna media sosial (*audience engagement*), sehingga dampaknya, opini yang kontroversial dan ekstrem akan dianjurkan oleh platform bagi para pendukungnya.

Dengan pertimbangan ini, kajian kami berfokus pada polarisasi isu transisi energi di media sosial. Para penulis mengambil posisi berpihak pada kelompok-kelompok di luar para pemegang kekuasaan (elite), dan berupaya memberi gambaran mengenai variasi pendapat dan posisi mengenai isu transisi energi di antara para non-elite. Kami berharap bahwa dengan penggambaran yang detail mengenai ini, pengembangan narasi alternatif mengenai isu transisi energi

berkeadilan dapat dibangun oleh proponent masyarakat sipil; dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang pro-, netral, dan kontra- terhadap isu transisi energi berkeadilan.

Studi ini dibagi menjadi lima bagian.

Yang pertama, kami menggambarkan latar belakang pemilihan fokus studi pada polarisasi dan pengembangan narasi alternatif mengenai transisi energi berkeadilan di Indonesia. Yang kedua, kami menyampaikan tujuan studi, yang dilanjutkan dengan paparan singkat mengenai metode yang kami gunakan pada bagian ketiga. Pada bagian keempat, kami memaparkan temuan studi, yang dibagi ke dalam tiga sub-bagian (polarisasi isu, persepsi orang muda, dan pengembangan narasi alternatif). Studi ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi bagi aktor pengembangan narasi alternatif berdasarkan bukti yang kami kumpulkan.

Tujuan

Kajian ini memiliki satu tujuan utama, dan tiga tujuan khusus. Tujuan utama kami adalah untuk memahami bagaimana isu transisi energi berkembang di masyarakat Indonesia. Tujuan khusus dari studi ini adalah:

1. Menggambarkan polarisasi isu transisi energi di media sosial.
2. Menggambarkan persepsi mengenai isu transisi energi.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan data bagi aktor yang terlibat dalam pengembangan narasi alternatif mengenai isu transisi berkeadilan (organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dll).

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan riset terapan dalam kajian komunikasi (*applied research in communications*). Riset terapan komunikasi adalah kajian komunikasi yang berfokus pada studi tentang suatu isu atau masalah sosial dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah sosial tersebut (Carmack, 2017). Secara khusus kami secara longgar menggunakan metode Analisis Jaringan Sosial (*Social Network Analysis*). Pada dasarnya, pendekatan ini memahami bagaimana percakapan di media sosial dapat memberikan gambaran atas gejala dari masalah-masalah yang mengakar.

Dalam hal ini, kami menggambarkan dinamika pergulatan kekuasaan di media sosial untuk memahami arah perkembangan narasi transisi energi dengan berfokus pada aktor dan jaringan yang relevan dengan Indonesia (Rakhmani dan Saraswati, 2021). Penerapan longgar metode Analisis Jaringan Sosial untuk menganalisis data dari platform Twitter telah dilakukan dalam berbagai studi terkait wacana isu iklim (IPCC, 2013; Pearce, W dkk, 2019; Williams, dkk, 2015; Jang and Hart, 2015; Cunningham, dkk, 2016). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakter percakapan media sosial melalui pemetaan pengguna (*user*) sebagai aktor dalam jejaring tersebut, mengamati sikap melalui cuitan mereka dan mendalami interaksi antar pengguna serta kecenderungannya (Williams, Hywel T.P. dkk, 2015). Analisis interaksi antar pengguna dan kecenderungan pandangan mereka terhadap isu tertentu juga dapat



dimanfaatkan untuk melihat potensi kolaborasi antar pemangku kepentingan dari beragam karakteristik (Cunningham. dkk, 2016; Corlew. dkk, 2015). Sebagai bagian dari rancangan studi, kami bekerja sama dengan Yayasan Indonesia CERAH, organisasi nirlaba Indonesia yang bergerak dalam pemajuan agenda kebijakan transisi energi.

Untuk mencapai tujuan studi, kami melakukan tiga riset mini secara paralel. Yang pertama adalah studi eksploratif pada data konten media sosial Twitter, yang digali melalui platform Talkwalker². Kami melakukan observasi daring pada aktivitas di media sosial Twitter yang berhubungan dengan tagar transisi energi pada periode 1 November 2022 hingga 30 Juni 2023. Kami membatasi rentang waktu ini dengan memperhatikan peluncuran kemitraan dalam transisi energi berkeadilan (JETP) di media arus utama.

² Talkwalker adalah solusi analisis media sosial yang membantu untuk analisis platform, memantau media sosial, dan serta memantau pemasaran pemengaruh (*influencer*).

Secara paralel, kami melakukan penyusunan instrumen survei eksploratif bagi orang muda. Orang muda dipilih dengan pendekatan *convenience sampling* (Neuman, 2014) dengan tujuan memberikan gambaran umum mengenai kelompok pengguna media sosial mayoritas di Indonesia yang datang dari kategori usia orang muda (We Are Social, Hootsuite, DataReportal, 2021). Survei eksploratif ini dilakukan di empat wilayah melalui jejaring himpunan mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Indonesia, Universitas Kutai Kartanegara, Universitas Swadaya Gunung Jati, dan Universitas Sriwijaya. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan membangun keterlibatan kelompok mahasiswa sebagai salah satu aktor utama dalam isu transisi energi berkeadilan, yang berada di dalam jaringan gerakan Yayasan Indonesia Cerah untuk memastikan kontinuitas pelibatan pemangku kepentingan muda melalui organisasi pengetahuan dan masyarakat sipil yang berfokus pada isu orang muda.

Kami juga melakukan metode riset aksi melalui serangkaian lokakarya bersama tim peneliti lapangan dari Yayasan Indonesia CERAH pada tiga wilayah kunci—Kalimantan Timur, Cirebon Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk memahami pengetahuan dan praktik pemangku kepentingan, serta membangun jejaring dengan sesama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan transisi energi (Asia Research Centre Universitas Indonesia & Yayasan Indonesia Cerah, 2023). Kami mengundang peserta diskusi yang merupakan perwakilan organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal,

pemerintah daerah, jurnalis, perusahaan tambang, dan akademisi. Kami memilih lokakarya sebagai metode riset aksi yang memungkinkan para peneliti menjadi bagian dari komunitas yang sedang diselidiki, yang mencerminkan tingkat keterlibatan kami dalam isu ini dalam kehidupan sehari-hari (McNiff & Whitehead, 2006).

Berdasarkan tiga mini riset ini, kami menyusun rekomendasi pelibatan pemangku kepentingan bagi proponent isu energi berkeadilan di Indonesia. Khususnya, kami menyusun rekomendasi ini untuk mengembangkan narasi alternatif melalui praktik riset aksi yang dapat dilakukan oleh non-spesialis.

Kajian Literatur

Dalam era modern, isu kebijakan energi telah menjadi subjek polarisasi yang semakin intens dibahas, khususnya di negara maju dengan struktur politik yang cenderung lebih ajek. Polarisasi terjadi antara kelompok yang memiliki tendensi sebagai konservatif versus yang lebih progresif atau liberal demokrat. Kami melakukan kajian terhadap literatur terdahulu dan mengidentifikasi beberapa faktor determinan dalam realita polarisasi kebijakan transisi energi, di mana pada konteks negara berkembang seperti Indonesia belum terlihat secara signifikan. Rujukan akademik yang diambil cukup beragam baik tahun, metode, dan kasus, sebaik mungkin, merepresentasikan kompleksitas literatur yang mendiskusikan isu ini. Dari kajian literatur ini, kami menemukan dua tema: (1) naiknya signifikansi isu lingkungan-energi dalam narasi publik, (2) bangkitnya populisme yang berhubungan dengan politik anti-sains

(Dalam dua tema ini, isu kebijakan energi semakin berkelindan dengan dinamika elite politik dan gerakan masyarakat sipil dengan cara yang dinamis.

Pertama, polarisasi dalam isu energi muncul sebagai respons terhadap krisis minyak bumi, pemanasan global, dan perundingan iklim. Kami menemukan dalam literatur bahwa isu transisi energi semakin menguat dan mendapatkan respons dari berbagai pihak, salah satunya partai politik yang mendapatkan manfaat dari pembuatan kebijakan mempertahankan maupun mengurangi penggunaan energi kotor. Semakin tinggi frekuensi peristiwa-peristiwa besar yang disoroti publik maka semakin kuat juga kebutuhan untuk merespon dan mengambil sikap (Jeong, et al. 2021). Politik elektoral di negara dengan ekonomi maju, secara umum, meskipun tidak bisa digeneralisasi, diwarnai oleh nilai-nilai liberal Barat di mana tiap kandidat politik menjanjikan kebijakan tertentu dalam isu energi. Sementara, politik elektoral di negara dengan ekonomi berkembang, khususnya negara pasca-otoritarian seperti Indonesia, diwarnai dengan janji kampanye yang berubah sejalan dengan konsolidasi elite di dalam maupun di antara partai politik. Sehingga, polarisasi isu energi yang mengemuka di tiap negara bersifat amat spesifik dan perlu diperbandingkan dengan kehati-hatian.

Berikutnya, naiknya populisme di dunia Barat ditandai dengan *post-truth politics* (lihat Frauen dan Knodt, 2018). Dalam kasus Jerman dan juga relevan di negara Eropa lainnya, tokoh politik populis dengan partai pendukung yang lebih konservatif

menyuarakan tuntutan atas nama masyarakat terdampak dari ketahanan energi. Oleh sebab itu, kebijakan transisi energi sering dibenturkan dengan resistensi lokal dengan tersebarnya pemberitaan hoaks yang tidak sesuai dengan fakta sosial dan sains (Zilles dan Marg, 2022). Sementara, di Indonesia, Rakhmani dan Saraswati (2021) mencatat bahwa posisi kandidat politik terhadap isu kebijakan energi merupakan bagian dari janji kampanye yang diperjualbelikan pada momen kampanye. Dalam kedua alir studi, potensi media massa dan sosial dalam mobilisasi aspirasi massa demi kemenangan elite politik, atau apa yang dikenal secara populer maupun akademik sebagai populisme, cenderung menguntungkan tokoh politik tertentu ketimbang masyarakat.

Mempertimbangkan studi-studi mengenai populisme yang bangkit di negara-negara demokrasi abad 21, akibat bertemunya kepentingan elite politik tertentu yang konservatif dengan aspirasi orang biasa pada momen politik elektoral, maka polarisasi adalah gejala daripadanya dan bukan fenomena yang dapat digeneralisasi di semua negara demokrasi. Sehingga, dalam isu transisi energi, polarisasi tidak terbentuk antara elite politik yang mengambil sikap pro- ataupun kontra- terhadap isu energi, namun terbentuk aliansi sementara antara beberapa aktor dan organisasi masyarakat sipil yang melawan ataupun setuju dengan kebijakan sementara yang dijanjikan oleh kandidat politik. Dengan memperhatikan hal ini, kami berikutnya memberikan gambaran umum mengenai isu transisi energi.

Gambaran Umum Isu Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi telah menjadi isu yang semakin sering dibahas oleh publik Indonesia, terutama pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 mengenai Nilai Ekonomi Karbon yang secara langsung memunculkan skema insentif pengurangan emisi gas rumah kaca dari kegiatan produksi energi, khususnya batu bara. Pengembangan transisi energi ke sumber yang baru dan terbarukan (EBT) mulai diformalkan dengan dibentuknya Direktorat Jenderal EBT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010. Sejak itu, transisi ke sumber daya energi yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon dikemukakan akan menjadi kunci utama bauran energi masa depan untuk menjaga eksistensi manusia di muka bumi akibat perubahan iklim dan pemanasan global dengan mencapai target *net zero* 2060.

Peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi isu utama transisi energi yang dibahas oleh publik dan privat. Pemerintah menargetkan bauran EBT dalam energi nasional mencapai 23% di tahun 2025, dan 31% di tahun 2050 yang

masih terhitung jauh dari realisasi data tahun 2021 yang hanya mencapai 13.55%. Pasokan energi nasional masih berfokus dan tergantung pada sumber daya fosil seperti batu bara dan minyak bumi yang mencapai total 70% lebih. Pengembangan energi transisi di Indonesia terhitung lambat, karena fokus kebijakan yang masih tidak berpihak kepada EBT dan masih adanya subsidi dan kemudahan bagi energi fosil khususnya batu bara untuk beroperasi di Indonesia. Di saat yang bersamaan terdapat kekhawatiran akan potensi kerentanan energi, menimbang kebutuhan energi Indonesia belum mencapai titik puncak, dan produksi EBT masih tidak ekonomis serta tinggi intermitensi (Berlianto & Wijaya, 2022; Setyono, 2021).

Transisi energi di Indonesia masih berfokus pada aspek ekonomi bagaimana menjaga stabilitas sumber energi ke depan, serta akses energi di daerah yang sulit terkoneksi dengan sistem grid dan kegunaannya. Hal ini masih jauh dari aspek keadilan lingkungan, yang bagi kami adalah kunci pendorong transisi energi dengan semakin rendahnya dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun secara sosial. Pemerintah berfokus pada penjagaan harga

energi yang masih jauh dari harga pasar, penjagaan supply dari permintaan yang terus meningkat, dan pengurangan anggaran pemerintah dari subsidi. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh peranan monopoli Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mendikte sumber energi apa yang akan masuk dalam portofolio mereka. Terdapat hirarki yang menghambat transformasi besar transisi energi di Indonesia dengan terbatasnya gerak inovasi dan intervensi (Ialnazov & Keeley 2020; Kennedy 2018).

Upaya dekarbonisasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sedang menuju dan harus menjadi perhatian multipihak dengan dikeluarkan beragam target dari pemerintah dengan adanya Nationally Determined Contribution (NDCs) dan target sektor swasta berdasarkan Science Based Target Initiative (SBTi). Dibandingkan dengan isu pembangunan lainnya seperti kemiskinan, ketahanan pangan, dan ekonomi, isu transisi energi belum kuat. Kami menjelaskan hal ini pada bagian temuan dengan lebih rinci.





02. Temuan

Bagian temuan akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kami akan mendeskripsikan polarisasi isu di media sosial Twitter dengan berfokus pada tagar transisi energi. Pada bagian kedua, kami akan menyampaikan hasil survei eksploratif mengenai persepsi orang muda sebagai salah satu aktor utama dalam pengembangan narasi transisi energi berkeadilan. Yang ketiga, kami memberikan gambaran mengenai praktik-praktik pelibatan aktor pengembangan narasi alternatif melalui riset aksi yang dapat dilakukan oleh non-spesialis komunikasi.

Polarisasi Isu: Eksplorasi terhadap #transisienergi pada Media Sosial Twitter

Kami bekerja sama dengan tim digital Yayasan Indonesia Cerah dalam melakukan eksplorasi tagar pada media sosial Twitter. Platform media sosial seperti Twitter menjadi salah satu saluran penting untuk diskusi dan debat terkait isu perubahan iklim (Pearce dkk, 2019). Twitter disebut sebagai platform ideal untuk mempelajari studi terkait komunikasi mengenai isu iklim karena banyak digunakan oleh politisi dan jurnalis (Arlt dan Schäfer, 2019). Dengan menggunakan *Talkwalker*, dan berfokus pada media sosial Twitter (sekarang bernama X) dan Instagram, kami membatasi cakupan studi pada periode bulan November 2022 hingga Juli 2023. Sebagai catatan, pengumpulan data secara real-time dari Twitter tidak lagi bebas semenjak perusahaan tersebut menutup akses gratis *Applications Programming Interface* (API) yang biasa digunakan oleh peneliti untuk mempelajari percakapan pengguna Twitter (Ledford,

2023; Binder, 2023)) Dalam periode ini, kami mengumpulkan 3,618 konten Twitter dan Instagram yang diperoleh dengan menggali konten berdasarkan sekitar 24 kata kunci yang relevan dengan perkembangan isu di Indonesia dan ditentukan oleh tim digital Yayasan Indonesia Cerah, sebagai berikut:

Tabel 1. Kata kunci studi eksplorasi #transisienergi

No	Kata Kunci
1	JETP
2	Just Energy Transition
3	Rencana Investasi
4	Pekerjaan Hijau
5	Green Jobs
6	Investment Plan
7	PT SMI Country Platform
8	ETM
9	Energy Transition Mechanism
10	Equitable Energy Transition
11	Pendanaan Transisi Energi
12	Pendanaan Energi Hijau
13	Utang Energi Terbarukan
14	Pensiun Dini PLTU
15	Transisi Energi Berkeadilan
16	Green Energy
17	Renewable Energy
18	Coal Plant
19	Retirement
20	Phase Out
21	Invest
22	Divest
23	Tambang
24	Tambang Batubara

Sumber: ARC UI dan Yayasan Indonesia Cerah.

³ Hasil penggalian atau scrape konten yang dilakukan dengan *Talkwalker* hanya menampilkan konten/post termasuk konten "Retweet" dan "Mention". Data konten yang dikumpulkan tidak termasuk konten "Reply" dari cuitan.

Untuk mendalami kecenderungan polarisasi jaringan, kami menggunakan kerangka polarisasi ideologi (*ideological polarisation*) yang fokus mengobservasi perbedaan pandangan, sikap, keyakinan atau keberpihakan politik (Kubin dan Sirorski, 2021). Melalui analisis percakapan di Twitter, kami mencoba mengidentifikasi berbagai jenis pengguna media sosial, tagar dan yang dapat mendorong terciptanya kluster percakapan selama periode yang telah ditentukan. Dari kajian data Twitter yang pernah diaplikasikan, kami menjadikan data *retweet* sebagai bentuk yang mewakili pandangan atau posisi tertentu terhadap suatu isu politik yang pada konteks studi adalah transisi energi. Secara sederhana, kami menerapkan analisis jaringan untuk melihat bagaimana pengurutan pengguna dan pemberi pengaruh di mana akun-akun dengan interaksi *retweet* serupa berdekatan satu sama lain dalam pengurutannya (lihat Falkenberg dkk, 2022). Polarisasi ideologi aktor-aktor di dalam jaringan akan terdistribusi berdasarkan pada konten, interaksi dan frekuensi konten di dalamnya

Kami merapikan data konten (*data cleaning*) untuk memisahkan antara konten Instagram dan Twitter, dan memilah konten *Retweet* dan konten sumber. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi ID akun Twitter yang pada hasil *data scrape* masih melekat pada tautan konten. Setelah proses *data cleaning*, kami melakukan analisis terhadap konten Twitter sebanyak 3,553 cuitan, baik secara keseluruhan periode maupun per bulan. Analisis data dilakukan melalui Netlytic⁴ dan ReTD⁵ untuk menampilkan gambaran analisis jejaring sosial, tagar, dan user teratas. Analisis percakapan dilakukan dengan mendalami dinamika user, tagar

dan *retweet*. Dalam konteks Twitter sebagai platform *microblogging*, *retweet* dianggap sebagai bentuk difusi informasi dan partisipasi. Dengan menyebarkan sebuah cuitan, user terlibat dalam percakapan sekaligus memvalidasi pesan cuitan tersebut (Boyd dkk, 2010).

Dari keseluruhan cuitan tersebut, 44.9% adalah konten *retweet* dari 40 user teratas, 17.2% juga merupakan *retweet* dari user di luar 40 user teratas, dan sisanya, 37.9 % merupakan konten *non-retweet*. Kelompok user 40 teratas mendominasi percakapan di X. Komposisi top 40 user teratas yang paling mengalami *retweet* terdiri dari akun yang berasal dari Indonesia dan di luar Indonesia. User Indonesia yang paling dominan mengalami *retweet* adalah “@_pln_id” akun resmi PT. PLN sedangkan user di luar Indonesia yang paling dominan berasal dari Afrika Selatan seperti “@LandNoli” dan “@PresidencyZA” dan akun menteri keuangan Amerika Serikat Janet Yellen “@SecYellen”.

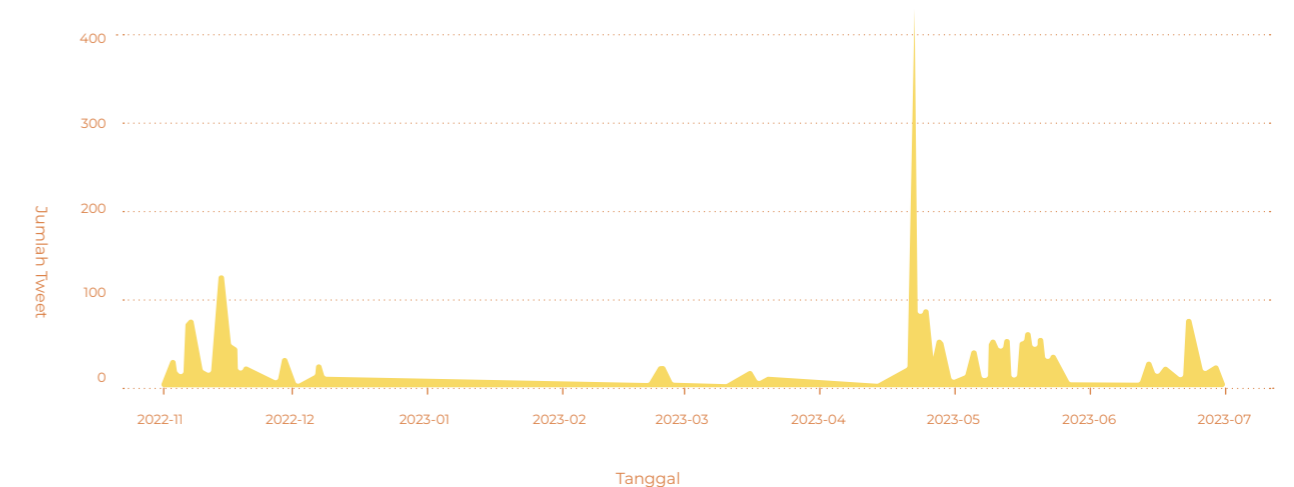


Gambar 1. 40 user teratas dalam transisi energi pada media sosial.

Sumber: ARC UI dan Yayasan Indonesia Cerah.

Untuk melihat tren berdasarkan tonggak peristiwa yang relevan dengan isu transisi energi dan JETP, kami juga melihat volume cuitan berdasarkan periode tanggal pengambilan data. Data ini kami kontekstualisasikan dengan momen yang relevan dan menjadi muatan utama dalam cuitan yang diampifikasi melalui mekanisme *retweet* maupun cuitan otentik.

Gambar 2. Tren volume tweet.



Sumber: ARC UI dan Yayasan Indonesia Cerah.

Jika dilihat dari Gambar 2, jumlah cuitan melonjak di antara tanggal 14-15 November 2022 bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Pada 14 November 2022, Indonesia meluncurkan *Energy Transition Mechanism Country Platform* menjelang KTT G20. Sedangkan tanggal volume cuitan pada 15 November 2022 juga melonjak seiring dengan peluncuran JETP Indonesia. Pada kedua tanggal tersebut, salah satu cuitan yang paling banyak mengalami *retweet* adalah akun Menteri Keuangan AS, Janet Yellen (“@SecYellen”). Selain itu, volume cuitan terbanyak berasal dari tanggal 20-23 April 2023 ketika PT PLN resmi meluncurkan kerja sama dengan International Energy Agency (IEA). Cuitan yang paling banyak beredar di periode tersebut adalah hasil *retweet* dari cuitan akun resmi PT PLN (“@_pln_id”). Pada tanggal 21 April 2023, cuitan dari sebuah akun Twitter yang berasal dari Afrika Selatan bernama

“@LandNoli” juga banyak mengalami *retweet* dengan cuitan yang mengutip Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, saat mengumumkan rencana pensiun dini PLTU di negaranya.



4:40 PM · Nov 14, 2022

Gambar 3. Cuitan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen pada 14 November 2022 (sumber: akun “@SecYellen”)

⁴ Netlytic adalah penganalisis teks dan jaringan sosial yang didukung komunitas yang dapat secara otomatis merangkum dan memvisualisasikan percakapan online publik di situs media sosial. Itu dibuat untuk peneliti oleh peneliti, tidak diperlukan keterampilan pemrograman/API. Dikutip dari <https://netlytic.org/index.php>

⁵ ReTD adalah aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan analisis cuitan-cuitan Top 4 Twitter. Kami mengaksesnya melalui: <https://github.com/ikbaloss/ReTD/releases/tag/Twitter>

Tren naik-turunnya jumlah cuitan seperti yang dideskripsikan di atas menunjukkan, pada media sosial, ekspresi mengenai transisi energi bersifat transnasional. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di luar batas negara, terkait peralihan energi kotor ke energi bersih, turut memengaruhi dinamika diskusi daring di Indonesia. Di sisi lain, tren tersebut juga menunjukkan bahwa diskusi daring di dalam negeri dapat dikatakan lebih cenderung merespon perkembangan di luar, ketimbang berkembang secara koheren di dalam negeri. Hal ini bagi kami mengungkap paling

tidak dua hal, absennya perkembangan monumental terkait implementasi agenda transisi energi di dalam negeri dan/ atau absennya pengguna-pengguna di dalam negeri yang dapat mengelola secara berkesinambungan perhatian publik secara signifikan terhadap agenda tersebut. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil dapat berstrategi agar dapat mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan perhatian di media sosial mengenai agenda transisi energi dalam kerangka yang adil dan berkelanjutan.

Gambar 4. 40 Tagar Teratas Selama November 2022 - Juni 2023



Sumber: Purnama Alamsyah, ARC UI dan Yayasan Indonesia Cerah

Eksplorasi dari tagar setiap bulannya selama bulan November 2022 hingga Januari 2023 menunjukkan bahwa media sosial didominasi dengan tagar yang bersifat internasional. Di antara tagar ini adalah #COP27, #JETP, #JustTransition dan #NetZero. Meskipun tagar penunjuk negara #Indonesia cukup dominan di periode November 2022 hingga Januari

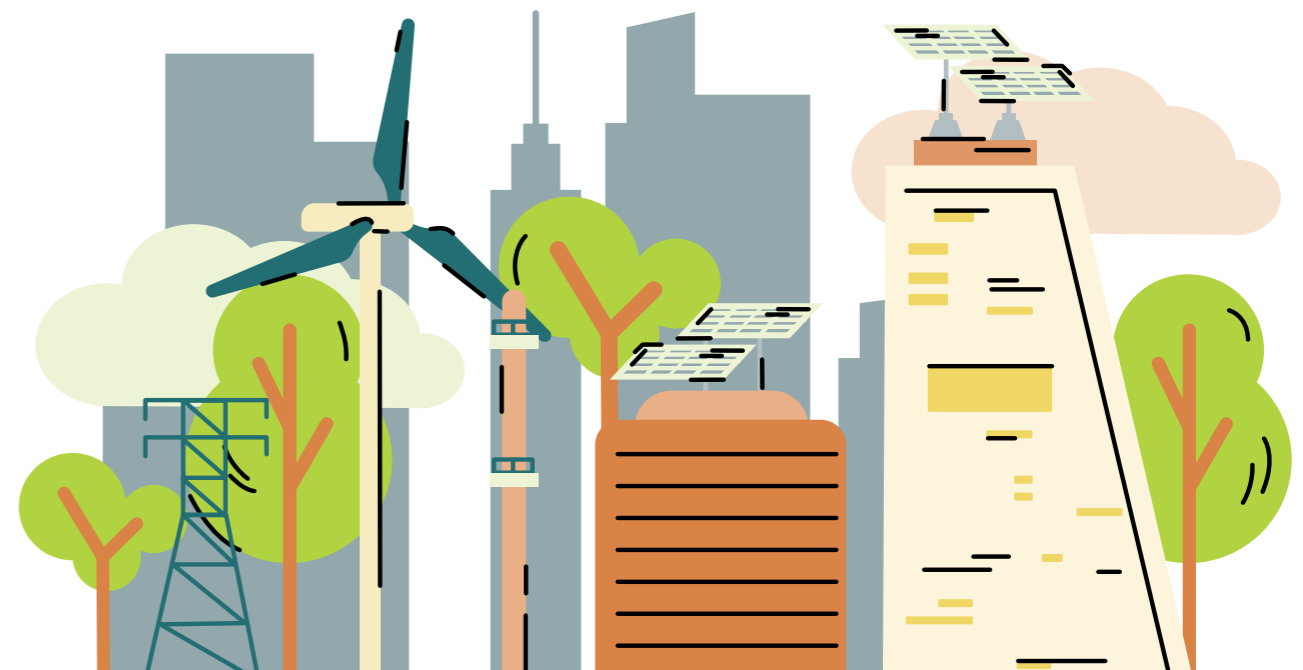
2023. Pada Februari 2023 penggunaan tagar dengan konteks Indonesia mulai nampak ke permukaan seperti #JETPIndonesia, #TransisiEnergiPLN, #BersihkanIndonesia. Pada bulan Maret 2023, salah satu tagar paling populer, #SavePangkalanSusu didorong oleh cuitan sebuah organisasi masyarakat sipil lokal yang mengadvokasi pensiun dini PLTU

Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara. Kemudian mulai di bulan April dan Mei 2023, tagar #PLN, #TransisiEnergiPLN, dan #PLNPimpinTransisiEnergi mendominasi seiring dengan cuitan akun resmi PT. PLN.

Pada waktu yang sama, PLN mengumumkan kerja sama dengan International Energy Agency (IEA) untuk mematenkan Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan (JETP IPP) dalam mengakselerasi transisi energi Indonesia. Pada bulan Mei 2023, muncul cuitan dari sebuah akun kanal informasi Bitcoin yang mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di konferensi Bitcoin 2023. Ridwan Kamil menyatakan bahwa Indonesia terbuka bagi investasi bitcoin dengan memanfaatkan energi terbarukan. Sedangkan di bulan Juni

2023, tagar yang dominan cukup beragam dengan didominasi oleh #JETP #Indonesia dan #EnergyTransition yang menunjukkan semakin beragam pengguna yang terlibat dalam percakapan isu ini. Di bulan tersebut juga semakin banyak organisasi masyarakat sipil yang menyoroti isu lingkungan serta energi dan media nasional yang membahas dan mengungkapkan posisi mereka terkait isu transisi energi seperti Bisnis Indonesia, dan Katadata.

Berdasarkan temuan ini, kami menelusuri tanggal-tanggal kunci terkait isu transisi energi di Indonesia. Kami melakukan hal ini melalui wawancara tidak terstruktur terhadap aktor kunci, serta penelusuran media arus utama dengan logika riset terapan komunikasi (Carmack, 2017).



Tabel 2. Linimasa peristiwa kunci Transisi Energi di Indonesia.

Tanggal	Peristiwa
14 November 2022	Peluncuran resmi <i>Energy Transition Mechanism</i> (ETM) country platform
15 November 2022	Pengumuman peluncuran JETP untuk Indonesia saat pertemuan G20
14 Desember 2022	Pengumuman JETP untuk Vietnam
16 Februari 2023	Sekretariat JETP Indonesia terbentuk
6 Maret 2023	PT PLN meluncurkan kerja sama dengan Jepang untuk percepatan Transisi Energi melalui skema JETP dan ETM
21 April 2023	PT PLN bekerjasama dengan International Energy Agency (IEA) untuk mematangkan skema JETP
22 Mei 2023	Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di konferensi Bitcoin 2023 terkait investasi bitcoin untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan di Indonesia

Sumber: ARC UI dan Yayasan Cerah Indonesia.

Analisis jejaring dari cuitan teratas (*top tweet*) secara keseluruhan menunjukkan tiga kluster percakapan yang dominan. Pertama, kluster “PLN” yang didominasi oleh akun-akun yang berafiliasi dengan PT PLN. Konten dari akun-akun tersebut terdiri dari *retweet* cuitan akun resmi PT PLN. Kluster kedua kami kategorikan sebagai kluster “Internasional” yang terdiri dari akun-akun tokoh dan institusi internasional seperti Menteri Keuangan AS, Janet Yellen (“@SecYellen”), Presiden Afrika Selatan (“@PresidencyZA”), dan akun COP26 (“@Cop26”). Kluster selanjutnya kami kategorikan sebagai kluster “Organisasi Masyarakat Sipil Nasional” dengan akun-akun organisasi beserta media alternatif.

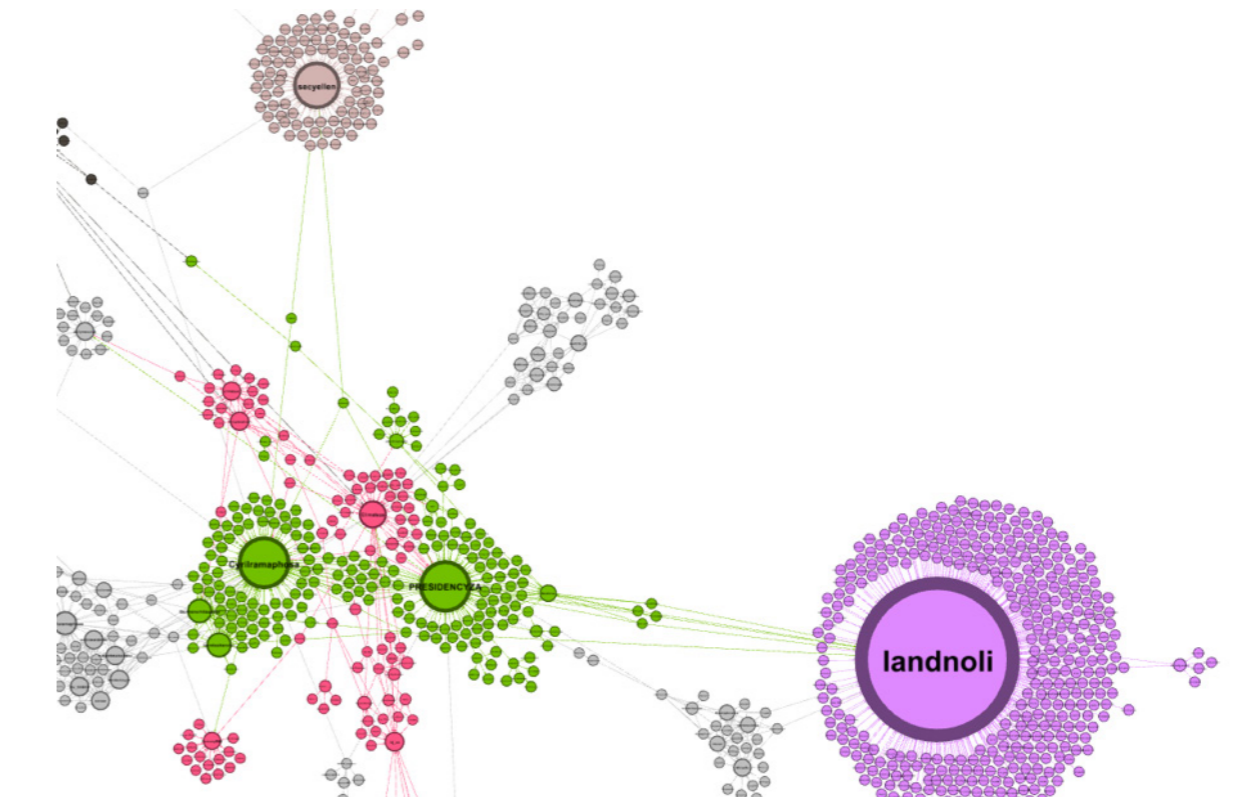
Ketiga kluster tersebut membangun percakapan terkait isu transisi energi dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan kapasitas dan agenda mereka. Kluster “PLN” mengkomunikasikan upaya dan kerja sama PT. PLN dengan lembaga internasional dalam transisi energi dan pensiun dini PLTU. Sedangkan kluster “Internasional” mengkontekstualisasikan isu transisi energi dalam kerangka kerja sama diplomatik dan ekonomi serta kegiatan internasional seperti KTT G20, COP26, implementasi JETP di Afrika Selatan dan sorotan internasional terkait peluncuran JETP. Sementara itu, pada kluster “Organisasi Masyarakat Sipil Nasional”, cuitan yang mendominasi mengedepankan pandangan kritis terhadap transisi energi dan skema JETP di Indonesia.

Gambar 5. Jaringan dan Kluster Mention dan Retweet secara keseluruhan



Sumber: Purnama Alamsyah, ARC UI dan Yayasan Indonesia Cerah.

Gambar 6. Gambaran kluster “Internasional”

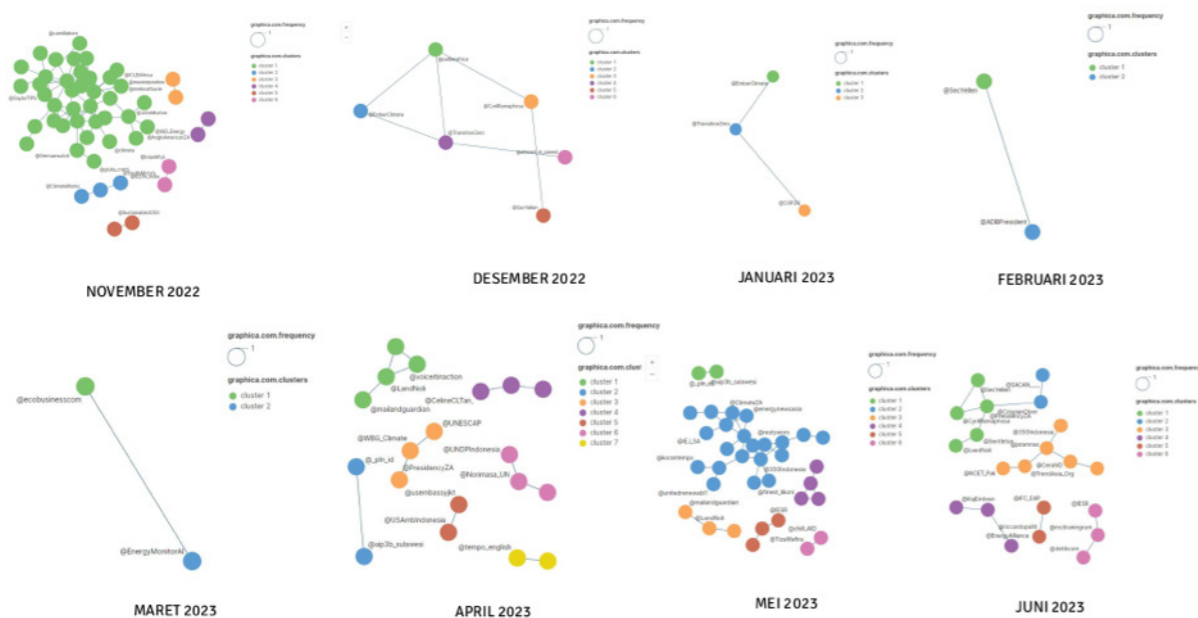


Sumber: Purnama Alamsyah, ARC UI dan Yayasan Indonesia Cerah.

Dari 40 cuitan teratas pada tiap bulan selama masa studi kami, jejaring cuitan tersebut konsisten terbentuk pada bulan-bulan tertentu. Klaster “Internasional” saling terhubung di bulan-bulan dengan peristiwa yang relevan dengan konteks internasional seperti bulan November 2022 ketika KTT G20 diselenggarakan. Klaster “PLN” juga mempertahankan jejaringnya di bulan

April hingga Mei 2023. Klaster “Organisasi Masyarakat Sipil Nasional” menggambarkan pergerakan yang lebih dinamis. Klaster ini terhubung dengan Klaster “Internasional” di bulan Mei 2023. Namun di bulan selanjutnya terdapat dua Klaster yang tidak terhubung meskipun dalam satu kategori “Organisasi Masyarakat Sipil Nasional”.

Gambar 7. Jaringan Cuitan Teratas per Bulan



Sumber: ARC UI dan Yayasan Cerah Indonesia.

Kajian terhadap linimasa peristiwa formatif dan hasil analisis digital terhadap akun 40 teratas, tagar, dan linimasa cuitan menunjukkan adanya pola. Diskusi media sosial di Indonesia dibentuk oleh kombinasi antara peristiwa kesepakatan antar-negara, yang digaungkan oleh institusi pemerintah yang ditunjuk untuk menerapkannya (dalam hal ini ESDM dan PLN). Kebijakan di tingkat lokal dapat muncul sebagai peristiwa nasional, jika pemimpin lokal berpartisipasi dalam peristiwa internasional. Sehingga, isu transisi energi berkeadilan terbentuk

secara diskursif, ketimbang terpolarisasi, karena adanya dorongan dari kerja sama internasional (dengan didukung dana dan pinjaman bagi pemerintah Indonesia) untuk mengawal isu transisi energi berkeadilan di Indonesia. Dorongan ini memberi kesempatan bagi pemimpin/elite lokal untuk berpartisipasi di diskusi media sosial tingkat nasional, yang juga turut membentuk diskursus mengenai isu transisi energi. Pada bagian berikutnya, kami mengeksplorasi pandangan orang muda sebagai warga mayoritas yang berpartisipasi di media sosial.

Persepsi Orang Muda terhadap Isu Transisi Energi

Kami mengeksplorasi persepsi orang muda terhadap isu transisi energi dengan setidaknya tiga pertimbangan. Pertama, orang muda adalah mereka yang akan merasakan dampak jangka panjang dari kebijakan energi yang kini tengah dibentuk sekaligus sebagai pengambil keputusan di waktu yang tidak jauh lagi (O'Brien dkk, 2018). Kedua, memahami persepsi orang muda terkait isu energi dapat membantu kita dalam merancang strategi komunikasi dan pelibatan yang diperlukan untuk mendorong isu transisi energi ke arah yang lebih berkeadilan (Gladwin & Ellis, 2023). Ketiga, orang muda sebagai mayoritas partisipan media sosial berpeluang turut membentuk wacana transisi energi (Safrina dan Yurnaidi, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, orang muda menunjukkan peningkatan kepedulian dan aktivisme di isu lingkungan (Laville & Watts, 2019) dan mengambil porsi yang terus bertambah dalam gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim dan keadilan sosial (O'Brien dkk, 2018). Melalui media sosial, kampanye online, dan partisipasi dalam politik formal (seperti yang dirintis melalui Partai Hijau Indonesia), mereka menunjukkan bahwa memahami, memfasilitasi, dan mengamplifikasi kebutuhan dan aspirasi orang muda adalah kunci untuk membentuk kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

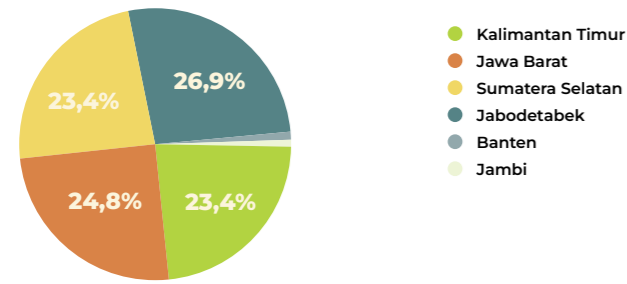
Akan tetapi, aktivisme orang muda, khususnya di bidang lingkungan masih sektoral dan terhambat oleh akses terhadap ruang-ruang pelibatan yang ada (Kusumaningrum dkk, 2023). Di sisi lain,

aktivisme ini lebih sering bertumpu pada kebijakan reformis dan gerakan lingkungan yang populer menekankan tanggung jawab pribadi tanpa komitmen terhadap aksi sipil yang cukup (Kusumaningrum dkk, 2023). Gerakan-gerakan semacam ini lebih sering menekankan perubahan gaya hidup yang dibebankan pada individu dan menjadi satu bentuk dari apa yang kerap disebut sebagai “aktivisme borjuis” (Mudhoffir, 2021).

Konsekuensinya, sebagian orang muda merasa tidak terwadahi. Sebagai isu kompleks yang menempati posisi nasional dan sub-nasional, tegangan-tegangan seperti itu dapat menghambat transisi apabila narasi transisi dibenturkan sebagai ketidakpastian ekonomi dan politik berdasarkan situasi interseksional kelas, geografi, dan struktur ekonomi berbasis industri ekstraktif dan energi kotor.

Untuk memahaminya lebih lanjut, kami secara purposif memilih (Lavrakas, 2008) responden di empat lokasi, yaitu Jabodetabek sebagai wilayah urban (Rustiadi dkk, 2015), Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur sebagai zona industri ekstraktif (Traction Energy Asia, 2020), dan Cirebon Jawa Barat sebagai kawasan industri dan lokasi PLTU yang akan dipensiunkan melalui skema *Energy Transition Mechanism* (ETM), yaitu skema transisi energi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan ADB, dijalankan melalui pemensiunan PLTU Cirebon-1 (ADB, 2023).

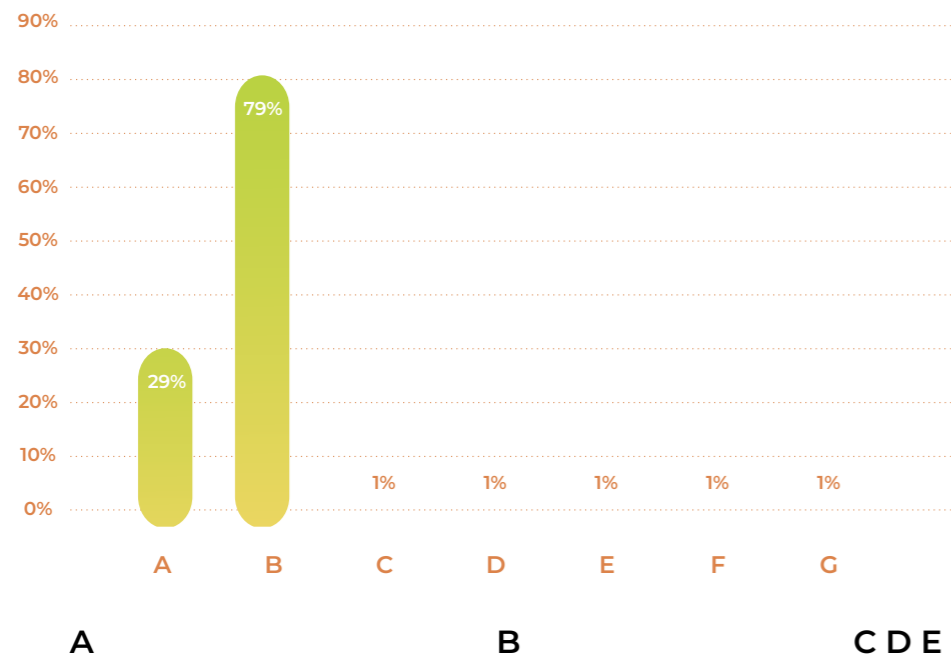
Gambar 8. Komposisi responden berdasarkan provinsi



Ke-145 responden yang mengikuti survei ini terdiri dari 71 perempuan dan 74 laki-laki. Mereka berusia antara 17-35 tahun dan

memiliki tingkat pendidikan minimum sekolah menengah atas. 98 dari mereka tergabung organisasi kemahasiswaan dan/atau komunitas lingkungan. Survei ini bertujuan untuk menggali varian aspirasi orang muda dan bukan untuk menggambarkan gejala umum orang muda di Indonesia. Survei ini dilakukan secara daring. Dengan demikian, survei ini hanya diikuti oleh mereka yang beruntung dapat mengakses gawai dan internet.

Gambar 9. Definisi transisi energi menurut orang muda.



A: Peralihan sumber energi dari yang kotor dan tidak berkelanjutan ke yang bersih dan berkelanjutan

B: Peralihan energi yang bersumber dari batu bara ke listrik

Sumber: ARC UI.

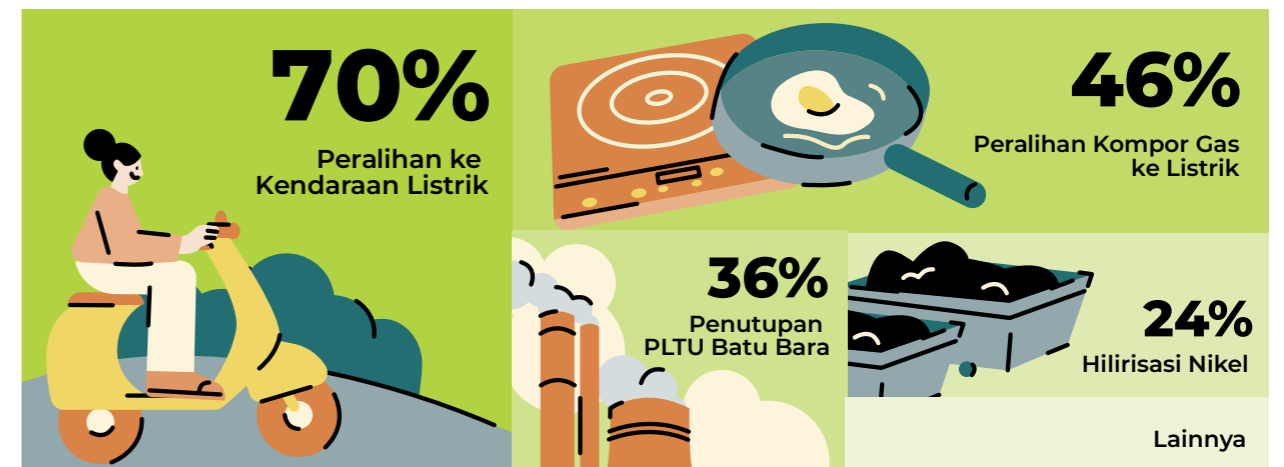
⁶ C: Proses mengubah penggunaan sumber energi berbasis fosil dan tidak ramah lingkungan menjadi penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan seperti panel surya, air, panas bumi, dan angin.
 D: Peralihan energi batubara ke energi yang lebih ramah lingkungan
 E: Peralihan energi yang kotor menjadi lebih kotor, arti kotor disini bukan hanya tentang lingkungan namun juga dampak untuk masyarakat sekitar itu sendiri
 F: Beralihnya penggunaan sumber energi dari yang kotor, tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan, bersih dan berkelanjutan
 G: Peralihan energi yang saya pahami sedikitnya, menggunakan energi bersih dan berkelanjutan, ramah bagi manusia dan penduduk bumi kita. Tanpa merusak atau mencemari. Transisi energi ini seharusnya ke arah yang berdaulat dan berkeadilan dimana kata daulat dan berkeadilan ini dilakukan secara merata dan tidak ada yang dirugikan dan berdaulat untuk kesejahteraan semua masyarakat. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak sekali potensi energi tanpa melibatkan energi kotor. Yang saya ketahui bahwa energi bisa ditemukan disekitar kita sendiri, seperti yang sering kita lihat sampah organik yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang jika diolah bisa menghasilkan biogas atau listrik jika menggunakan media teknologi yang memungkinkan, gas metana juga terdapat pada kotoran sapi dan hewan lainnya yang bisa menghasil dan dimanfaatkan.. dan itu adalah energi yang kita mencemari lingkungan.

Kami menggali pengetahuan mereka tentang transisi energi. Kami bertanya mengenai definisi transisi energi (jawaban jamak). Dua jawaban tertinggi adalah peralihan energi yang bersumber dari batu bara ke listrik (79%) dan peralihan sumber energi dari yang kotor dan tidak berkelanjutan ke yang bersih dan berkelanjutan (29%). Kami melihat bahwa “listrik” menjadi kata kunci dari definisi transisi energi, menurut orang muda. Temuan ini sejalan dengan temuan kami di media sosial, di mana PLN sebagai BUMN penyedia listrik, melalui akun dan tagarnya, muncul sebagai pengguna dan tagar yang paling dominan.

Temuan tersebut juga sejalan dengan pengetahuan responden atas agenda

transisi energi yang digagas oleh pemerintah (jawaban jamak). Jawaban terbanyak adalah peralihan ke kendaraan listrik (70%). Kemudian diikuti dengan jawaban peralihan kompor gas ke kompor listrik (46%), penutupan PLTU batu bara (36%), dan hilirisasi nikel (24%). Pembangunan ekosistem kendaraan listrik merupakan kebijakan yang kini sangat gencar diurusutamakan oleh pemerintah dan PLN, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, dan kemudian digaungkan sebagai solusi atas polusi udara oleh para pejabat terkait melalui media massa (CNN Indonesia, 2023) dan siaran pers PLN.

Gambar 5. Agenda transisi energi pemerintah menurut orang muda.

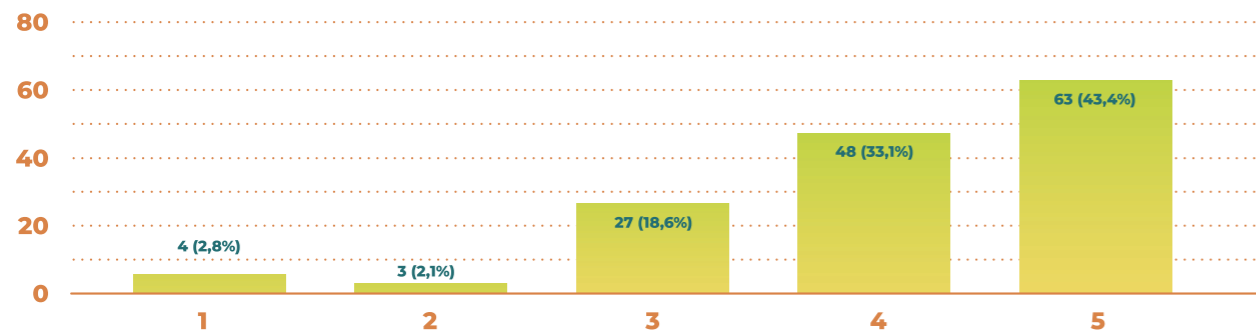


Sumber: ARC UI.

Kami melanjutkan dengan meminta responden menjawab seberapa penting agenda transisi energi. Secara umum, sebagian besar responden (76,5%) menganggap agenda transisi energi sebagai hal yang penting dan setuju bahwa transisi energi merupakan langkah yang tepat

(73,1%). Namun, kami ingin menggarisbawahi bahwa 23,5% responden menjawab ragu-ragu/netral bahkan menjawab agenda transisi energi tidak penting. 24,9% responden juga menjawab ragu-ragu dan tidak setuju pada pernyataan “transisi energi merupakan langkah yang tepat”.

Gambar 6. Persepsi orang muda tentang pentingnya agenda transisi energi



Sumber: ARC UI.

Meskipun sebagian besar responden menunjukkan pengetahuan dan respon yang positif terhadap transisi energi, namun seperempat responden yang menjawab sebaliknya merupakan persentase yang cukup banyak untuk menggambarkan kurang terlibatnya orang muda dalam isu ini, sejalan dengan temuan Kusumaningrum dkk (2023).

Kami juga menggali alasan responden menjawab derajat kepentingan agenda transisi energi. Responden mengisi jawaban terbuka, sehingga jawaban dari seorang responden dapat mengandung lebih dari satu tema kunci. Kami menemukan tema kunci yang banyak terulang adalah karena alasan polusi udara (24 respon), untuk keberlanjutan lingkungan (22 respon), untuk mengantisipasi kelangkaan energi tidak

terbarukan (17 respon), untuk mencegah krisis iklim dan bencana (16 respon). Namun kami juga menemukan total 18 responden yang tidak memberikan alasan atau yang kami interpretasi sebagai ketidakpahaman mengenai isu transisi energi.

Kami juga menggali media yang menjadi sumber informasi tentang transisi energi (jawaban jamak). Jawaban terbanyak adalah media massa, baik daring maupun cetak (72%), laporan riset, webinar akademik, dan sejenisnya (48%), dan pemengaruh di media sosial (28%). Melihat temuan ini, kami berargumen bahwa orang muda merujuk pada informasi yang sumbernya lebih terlembaga dan kredibel (Hovland & Weiss, 1951). Sumber informasi lainnya adalah televisi (2%), organisasi pegiat lingkungan (1%), dan observasi sehari-hari (1%).

Gambar 7. Sumber informasi mengenai transisi energi



Media Massa (daring ataupun cetak)

Laporan Riset, Webinar Akademik atau sejenisnya

Influencer di Media Sosial

Lainnya

Sumber: ARC UI.

Pada aspek-aspek yang lain, kami menemukan banyak jawaban ragu-ragu, misalnya pada pernyataan kekhawatiran transisi energi dapat mempengaruhi stabilitas pasokan energi (42,1%), kekhawatiran bahwa transisi energi akan meningkatkan biaya energi bagi konsumen (36,6%), khawatir bahwa transisi energi akan mengganggu ekonomi negara (37,2%), khawatir bahwa transisi energi akan menutup lapangan pekerjaan di daerahnya (37,2%), khawatir bahwa energi terbarukan masih belum stabil dan dapat mengganggu pasokan listrik (39,3%).

Pada bagian tentang persepsi orang muda ini, kami ingin menyoroti dua temuan penting.

Pertama, kekhawatiran yang disuarakan oleh responden orang muda di atas menyarankan bahwa mereka belum mendukung sepenuhnya agenda transisi energi. Orang muda belum mengambil sikap politis yang jelas, karena belum mengidentifikasi sumber kecemasan mereka terhadap masa depan kualitas udara dan lingkungan yang akan mereka hadapi. Isu yang lebih material adalah kekhawatiran publik atas naiknya tarif listrik (CNN Indonesia, 2021) dan terhambatnya aktivitas ekonomi serta pembangunan nasional (Anam, 2022). Hal ini bisa menjadi dasar untuk menghindari upaya-upaya beralih dari energi kotor ke energi bersih (Ordonez et al., 2022). Kami berargumen bahwa orang muda, dengan pengetahuan lebih mengenai apa itu transisi energi berkeadilan dan apa hambatan utama mewujudkannya, dapat memegang peran lebih sentral (melalui jaringan kampus) untuk mendorong agenda transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Kedua, kata kunci utama yang berulang muncul adalah polusi udara dan kendaraan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa orang muda sangat dekat dengan isu-isu yang berdampak langsung terhadap mereka. Akhir-akhir ini, publik kawasan Jabodetabek terpapar polusi udara dengan intensitas tinggi yang penyebabnya diduga berasal dari aktivitas industri, termasuk PLTU (Tempo.co, 2023) Dengan latar belakang ini isu kendaraan listrik mengemuka. Pemerintah (CNN Indonesia, 2023) dan PLN (2023) menggaungkan penggunaan kendaraan listrik sebagai “solusi” dari polusi udara di kawasan Jabodetabek.

Kami menemukan bahwa orang muda dalam survei ini, meskipun ada, belum secara aktif mengekspresikan pengetahuan bahwa baterai untuk kendaraan listrik tidak sepenuhnya bersumber dari energi yang terbarukan dan tidak dapat habis (Yunus, 2023). Terpaparnya orang muda terhadap narasi peralihan ke kendaraan listrik sebagai solusi mengurangi polusi udara menunjukkan pentingnya organisasi masyarakat sipil untuk semakin menarget orang muda dalam menyebarluaskan dan berperan vital dalam pembentukan narasi transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan akademisi dan orang muda di kampus untuk mendapatkan informasi tidak hanya dari media massa (daring maupun cetak), melainkan juga dari produk akademik, seperti laporan riset, webinar dan sejenisnya.

Pengembangan Narasi Alternatif melalui Praktik Riset Aksi

Dalam kajian ini, kami mengadakan serangkaian lokakarya bersama tim peneliti lapangan dari Yayasan Indonesia CERAH pada tiga wilayah kunci—Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, yang keduanya merupakan kawasan industri ekstraktif (Traction Energy Asia, 2020), serta Cirebon, tempat sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan segera dipensiunkan (ADB, 2023). Tujuan dari lokakarya ini adalah (1) untuk memahami pengetahuan dan praktik pemangku kepentingan, (2) dan membangun jejaring dengan sesama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan transisi energi (Asia Research Centre Universitas Indonesia & Yayasan Indonesia Cerah, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mengundang peserta diskusi yang merupakan perwakilan organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, pemerintah daerah yaitu dinas lingkungan hidup, sekretariat daerah, badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol), jurnalis, perusahaan tambang, dan akademisi. Lokakarya kami pilih sebagai bentuk metode riset aksi yang memungkinkan peneliti untuk berperan sebagai bagian dari komunitas yang sedang diteliti, sebagai suatu bentuk refleksi atas tingkat keterlibatan kami dalam masalah ini di level keseharian (McNiff & Whitehead, 2006).

Di setiap lokakarya yang kami laksanakan di berbagai daerah, kami mengumpulkan data dan umpan balik yang berharga untuk memperdalam analisis kami dan membantu merumuskan strategi lanjutan, terutama

⁷ "...Kalau bercerita dulu dari awal berbicara tentang transisi energi di Kaltim, ini harusnya berbicara soal pemerataan energi terlebih dahulu. Karena sampai sekarang saja energinya belum merata tapi mau membahas soal transisi energi. Ini tidak masuk akal. Banyak dari daerah terpencil di Kaltim belum bisa mengakses listrik dari PLN ..." (S, perwakilan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Timur).

untuk meningkatkan strategi komunikasi. Selama lokakarya, tim peneliti kami bekerja erat dengan berbagai pihak untuk merumuskan strategi dan rekomendasi yang efektif. Dalam kajian aksi kolaboratif ini, kami dan tim dari Yayasan Indonesia Cerah berupaya membangun pemahaman bersama tentang tantangan dan peluang yang ada. Dalam laporan ini, kami membahas diskusi yang kami lakukan di Kalimantan Timur; Cirebon, Jawa Barat; dan Sumatera Selatan.

Di Kalimantan Timur, kami menemukan bahwa daripada membahas transisi energi, diskusi lebih banyak membahas ketidakmerataan energi⁷ dan dilema antara dampak negatif aktivitas pertambangan bagi mereka dan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakatnya yang bekerja di pertambangan, mengingat Kalimantan Timur adalah provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertambangan dan penggalian tertinggi pada tahun 2017-2019 (Katadata, 2021). Sementara itu, di Jawa Barat, diskusi tentang konsep transisi energi dapat lebih luas dibahas.

"Soal persepsi masih jauh, membahas soal transisi energi rasanya masih jauh karena masih banyak yang menikmati hasil tambang. Contohnya di Desa Sungai Payang yang wilayahnya dikelilingi pertambangan. Banyak warganya yang menjadi pekerja disana dengan gaji rata-rata 4-6 juta rupiah ..."

(A, jurnalis di Kalimantan Timur, 13 Juni 2023)



Meskipun demikian, kami mengumpulkan kata kunci yang berulang yang diinterpretasikan sebagai transisi energi yang ideal oleh peserta diskusi di Kalimantan Timur dan Cirebon. Kata-kata kunci tersebut adalah berkeadilan⁸, melibatkan masyarakat⁹, terjangkau¹⁰, dan ramah lingkungan¹¹.

Selain itu, kami menggali apa-apa saja yang dianggap sebagai tantangan transisi energi di tingkat daerah.

Pertama, mengenai kewenangan.

Kami menemukan bahwa kewenangan pemberian perizinan pertambangan batu bara tersentralisasi di pemerintah pusat¹². Konsekuensinya, meskipun pemerintah

kabupaten menemukan bencana alam dan sosial akibat aktivitas dan pasca tambang, mereka kesulitan untuk mengambil tindakan. Namun demikian, pada saat tertentu, "oknum" pemerintah daerah, juga tentara dan polisi seolah memiliki wewenang ketika membela perusahaan tambang yang berseberangan dengan masyarakat.

"... Kalau bicara soal aktor, aktor yang paling penting itu aparat yaitu bisa tentara, polri. Kalau pemerintah sekarang bilanganya tidak punya wewenang untuk berbuat apa-apa untuk kasus apapun. Namun, ketika mereka dipergunakan perusahaan, justru Pemerintah Daerah membantu perusahaan. Mereka mempermudah eksploitasi masyarakat. Mereka yang memfasilitasi pembebasan lahan masyarakat dengan harga murah..."

(S, perwakilan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Timur, 13 Juni 2023)

Kedua, minimnya pelibatan masyarakat dalam agenda atau kebijakan yang diimplementasi di wilayahnya. Masyarakat lokal kerap kali diinterpretasi sebagai pihak yang tidak mengerti, sehingga perlu mendapat sosialisasi bahkan edukasi. Padahal, menurut perwakilan organisasi masyarakat sipil di Cirebon, masyarakat lokal justru pihak yang mengerti tentang lingkungannya sehingga mereka melakukan penolakan terhadap upaya pertambangan, dalam hal ini geothermal atau panas bumi.

⁸ "... Harus berkeadilan juga serta harus ada unsur keadilan HAM di dalamnya ..." (E, perwakilan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Timur)

⁹ "Menurut saya wacana kebijakan Transisi Energi itu harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat terutama orang-orang yang paling rentan", R, perwakilan NGO di Cirebon

¹⁰ "... jadi energi itu menurut saya terjangkau dan memasyarakat" (N, perwakilan Dinas ESDM Cirebon)

¹¹ "... sangat mendukung dengan adanya transisi yang lebih ramah lingkungan, lebih murah, lebih mudah ..." (H, jurnalis di Kalimantan Timur)

¹² Siaran pers pada situs Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, yang kami peroleh dari <https://desdm.kaltarprov.go.id/berita/pemerintah-pusat-delegasikan-izin-usaha-pertambangan-ke-daerah.html>

“...Misalnya kayak kemarin ada penolakan terhadap Chevron, terhadap Geothermal. Itu kan mengandaikan bahwa masyarakat menolak itu karena nggak ngerti. Bukan. Masyarakat menolak itu karena ngerti... Jadi saya pikir yang diperlukan itu bukan sosialisasi, bukan edukasi, tapi ajak mereka terlibat dalam proyek ini. Bukan dari pelaksanaan saja, dari rencana kalau bisa.”

(Perwakilan organisasi masyarakat sipil di Cirebon)

Sementara itu, di tengah isu minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan sistem energi dan tidak adanya akses listrik dari BUMN PLN di desanya, masyarakat desa Muara Enggelam, Kalimantan Timur, justru melakukan sebuah inisiatif berupa penggunaan listrik berbasis panel surya, yang dikelola komunal oleh badan usaha milik desa setempat (S, perwakilan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Timur; Mongabay, 2023).

Ketiga, soal pendanaan. Peserta diskusi, utamanya perwakilan organisasi masyarakat sipil dan jurnalis, menggarisbawahi kewaspadaan atas pendanaan transisi energi. Mereka menagih adanya transparansi pendanaan karena khawatir akan skema utang berkedok investasi yang akan membebani keuangan negara di masa kini dan masih ditanggung oleh generasi berikutnya.

“Mungkin tadi sudah dijelaskan beberapa terutama yang tadi dari perwakilan jurnalis memang betul harus ada sebuah transparansi terutama yang saya tekankan adalah investasi, bagaimana proporsi atau porsi yang ada antara investasi swasta, asing ataupun reinvestment itu harus jelas, di dalam Transisi Energi jangan sampai investasi

ini malah jadi trap di negara bukannya mengurangi beban tetapi menambah beban yang akhirnya merusak dari esensi intergenerational justice itu sendiri”

(D, perwakilan organisasi masyarakat sipil di Cirebon)

Keempat, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil terkait adanya potensi korupsi dan jual beli isu dalam agenda transisi energi, terutama dengan adanya pendanaan besar yang terlibat dan menjelang pemilihan presiden yang diasosiasikan sebagai masa di mana aktor-aktor politik membutuhkan dana dan tengah menyusun ulang formasi politiknya. Untuk itu, ada tuntutan untuk proses yang transparan dan adil:

“Kita harus lebih substansial memandang transisi energi. [...] mayoritas masyarakat Indonesia ini belum paham apa itu transisi energi? [...] Jangan sampai ketika pemilu tiba-tiba ini dijadikan isu untuk menarik masa.

Transisi Energi Berkeadilan ini rawan potensi korup. Sekarang kan jelang Pilpres lagi Big Sell ini, lagi gede-gede kasus korupsi, adanya ini terus kemudian adanya JETP, Transisi Energi ini juga persinggungan dari teman-teman CSO yang lain juga, kita saling mengawal apalagi dananya nilai triliunan dolar pasti ada bukan pasti ya alasnya yang mau menulis khawatir adanya potensi korupsi itu yang menjadi kekhawatiran.”

(E, Perwakilan masyarakat sipil di Cirebon)

Pada akhir bagian ini, kami menarik kesimpulan bahwa narasi kebijakan transisi energi masih menjadi kontestasi. Kontestasi narasi ini sendiri masih berjalan, mengingat belum ada narasi ajek pada benak pemangku kepentingan di daerah

mengenai konsep, perencanaan, tujuan, dan skema pendanaan transisi energi. Sama seperti pada bagian orang muda, kami menyuarakan agar kontestasi ini dimenangkan narasi transisi energi yang berkeadilan bagi masyarakat dan alam. Pemerintah daerah dan pejabat dinas yang kami wawancarai pun, juga menyadari situasi dan posisinya sebagai masyarakat dan bergantung pada alam.

Melalui metode riset aksi ini, kami melihat bahwa perdebatan-perdebatan yang muncul di sekitar transisi terletak pada sektor-sektor yang berbeda dan belum terjalin sebagai narasi yang utuh. Akan tetapi, melalui pertemuan yang difasilitasi oleh metode riset aksi ini, kami turut menjalin interaksi lintas sektor dan memperlihatkan kepada para peserta bagaimana kekhawatiran, analisis, dan pandangan yang mulanya terlihat terpisah (kemacetan kota, polusi, hilirisasi dan kondisi kerja, korupsi, dst.) di antara aktor-aktor dari berbagai institusi lintas sektor (swasta, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat terdampak, organisasi masyarakat sipil) adalah masalah-masalah yang saling terhubung satu sama lain dan bahwa nasib masing-masing akan ikut terdampak.

Skema-skema pembangunan gagal mewujudkan tujuan mereka bukan hanya karena kolusi antara kepentingan negara dan kapitalis ataupun simplifikasi, namun juga karena negara itu sendiri terdiri dari aktor-aktor yang memiliki agenda yang berbeda-beda (Dewan, 2021). Tanpa adanya konsolidasi di antara aktor-aktor yang dapat mengawal transisi energi berkeadilan, isu ini juga rawan berujung pada berubahnya

energi bersih kembali menjadi sistem energi yang mereproduksi kepentingan akumulasi yang dulu mendorong energi kotor untuk diadopsi (Malm, 2016).

Dalam riset aksi yang kami lakukan, salah satu tujuan kami adalah memetakan dan menyusun aliansi. Riset kami menunjukkan bahwa sejumlah pejabat pemerintahan memiliki pandangan kritis terhadap ekstraksi energi kotor, terutama batubara. Banyak di antara mereka, seperti masyarakat pada umumnya, merasa resah dengan keberadaan tambang batubara, terlebih yang beroperasi secara ilegal:

“Namun, seperti yang kita tahu bahwa batubara akhir-akhir ini masyarakat juga resah dengan keberadaan tambang batubara. Apalagi tambang batubara yang ilegal. Kalau boleh mewakili masyarakat, kalau boleh jujur itu kami bersyukur batubara ini tidak akan digunakan lagi supaya alam kami tidak rusak. Setiap pertemuan dengan masyarakat, kami sering mengobrol dengan adanya PLTU yang menggunakan batubara kemudian alam kami dieksploitasi besar-besaran bahkan sekarang ditambah tambang ilegal. Jalan-jalan banyak yang rusak.”

(S, perwakilan dari Kesbangpol di Kalimantan Timur, 14 Juni 2023).

Melalui riset aksi ini, kami berharap akan ada keberlanjutan yang dapat mendorong kerja-kerja lapangan dan negosiasi yang diperlukan untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Gambaran Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan

Menurut Grande dan Hutter (dalam Zilles & Marg, 2022) polarisasi mengacu pada kelompok individu yang memiliki preferensi dan aktivitas yang saling terkait, secara tegas membatasi diri mereka dari kelompok lain dan dengan demikian membangun 'kubu lawan yang kuat'. Namun demikian, pada konteks Indonesia, dengan memperhatikan narasi pemerintah pusat dan PLN serta menganalisis diskusi

grup terpumpun, kami berargumen bahwa kelompok-kelompok aktor tidak secara tegas membatasi diri mereka dari kelompok lain. Kami berargumen bahwa perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok aktor bersifat pragmatis. Oleh karena itu, kami mengelompokkan dua kelompok aktor berdasarkan besaran kekuasaan yang dimiliki dan berdasarkan keamatan dampak yang mereka rasakan terhadap transisi energi. Oleh karena itu, kami mengelompokkannya sebagai kelompok pusat dan kelompok daerah.



Tabel 3. Kelompok Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan di Tingkat Pusat	Pemangku Kepentingan di Tingkat Daerah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Aparat Keamanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Daerah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Swasta
Kementerian Keuangan	Masyarakat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Organisasi Masyarakat Sipil
Kementerian Perindustrian	Media

Sumber: Ciera Group dan PT Hatfield Indonesia (2023) dan olahan peneliti berdasarkan diskusi terpumpun pada Juni-September 2023

Pemangku Kepentingan di Tingkat Pusat

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengembangan dan implementasi kebijakan, pembinaan, pengawasan, serta riset dan pengembangan dalam ranah energi terbarukan dan konservasi energi. Menjamin penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan sasaran peralihan ke sistem energi yang lebih berkelanjutan.

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak yang bertanggung jawab secara nasional dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) dan untuk mencapai target NDC¹³. KLHK bekerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan di daerah hutan, dan juga menyediakan pelayanan publik dan perizinan dalam domain lingkungan hidup dan sektor kehutanan, termasuk langkah-langkah perlindungan (safeguards).

3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang merupakan entitas utama yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia. Dengan melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya di sektor energi, minyak, dan gas, Kementerian BUMN memastikan

bahwa transisi energi berlangsung sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah.

4. Kementerian Keuangan

Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang merupakan entitas utama yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia. Dengan melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya di sektor energi, minyak, dan gas, Kementerian BUMN memastikan bahwa transisi energi berlangsung sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah.

5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bappenas mengkoordinasikan kebijakan pembangunan nasional dengan tujuan mendukung transisi yang merata dan inklusif menuju ekonomi hijau, menjamin perlindungan sosial, meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

6. Kementerian Perindustrian

Mendorong industri hijau dengan kerja sama dari Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Selain itu, kementerian ini harus memastikan bahwa standar dan peraturan industri mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan keberlanjutan dalam bisnis industri sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

¹³ Nationally Determined Contributions (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030.

Pemangku Kepentingan di Tingkat Daerah



1. Aparat Keamanan

Pihak yang memiliki pengaruh dan keterlibatan tinggi untuk melakukan pengamanan, dengan kecenderungan keberpihakan kepada pihak swasta, di wilayah infrastruktur energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

2. Pemerintah Daerah

Pada praktiknya, pemerintah daerah (pemda) hanya mengimplementasikan regulasi dari pemerintah pusat. Dinas terkait energi yang kini hanya ada pada tingkat provinsi (tidak ada pada tingkat daerah) turut mengurangi kekuasaan pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten. Kepentingan yang disorot oleh pemda adalah dampak ekonomi bagi daerah dan dana bagi hasil dari sektor energi.

3. Swasta

Pihak yang memiliki kepentingan berupa investasi dan keberlanjutan bisnis. Pihak swasta dalam konteks ini bergerak pada pertambangan batu bara dan mulai merambah ke pertambangan nikel seiring dengan meningkatnya narasi energi terbarukan.

4. Masyarakat

Masyarakat dalam konteks ini adalah mereka yang tinggal di provinsi dengan perekonomian yang bertumpu pada sektor ekstraktif. Mereka adalah yang merasakan dampak positif dalam hal kesediaan lapangan pekerjaan, namun mereka juga yang mendapatkan dampak negatif berupa minim terdengarnya dan minim pelibatan mereka dalam kebijakan energi, serta bencana dan risiko kesehatan akibat kegiatan pertambangan.

5. Organisasi Masyarakat Sipil

Masyarakat dalam konteks ini adalah mereka yang tinggal di provinsi dengan perekonomian yang bertumpu pada sektor ekstraktif. Mereka adalah yang merasakan dampak positif dalam hal kesediaan lapangan pekerjaan, namun mereka juga yang mendapatkan dampak negatif berupa minim terdengarnya dan minim pelibatan mereka dalam kebijakan energi, serta bencana dan risiko kesehatan akibat kegiatan pertambangan.

6. Media

Pihak yang berpeluang membuka ruang publik dan menjaga kepentingan publik untuk transisi energi yang berkeadilan. Namun, pekerja media (berpotensi) mengalami represi oleh aparat keamanan dan/atau preman yang dimobilisasi oleh aktor swasta dan/atau pemerintah.

Identifikasi tipe pemangku kepentingan ini dapat digunakan oleh lembaga masyarakat sipil untuk mengenali klasifikasi posisi pihak tertentu terhadap isu kebijakan transisi energi berkeadilan. Dengan begitu, aktor masyarakat sipil dapat secara mandiri menyusun daftar lembaga dan aktor yang mengikuti enam tipe pemangku kepentingan yang kami sajikan berdasarkan kajian literatur.

Melalui penelusuran di media sosial, diskusi mengenai transisi energi berkeadilan di media sosial Indonesia terbentuk oleh pengaruh peristiwa internasional dan kebijakan antar-negara yang dipromosikan oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian ESDM dan PLN. Kebijakan lokal mungkin mendapatkan perhatian nasional ketika pemimpin lokal terlibat dalam forum internasional. Dengan dukungan finansial internasional, termasuk dana dan pinjaman, isu transisi energi di Indonesia didiskusikan secara konstruktif, bukan polarisasi. Akan tetapi, berdasarkan hasil FGD yang kami lakukan, kami melihat bahwa Kerangka kerja serta prioritas yang dimiliki pemerintah pusat sampai saat ini masih berbeda dengan kerangka pemerintah daerah dan masyarakat lokal serta masyarakat sipil dalam melihat transisi.

Hal ini dapat dilihat melalui 4 aspek:

1. Kedekatan pandangan mengenai transisi energi
2. Stakeholder mapping oleh Masyarakat sipil di Kalimantan Timur
3. Prioritas-prioritas agenda transisi dari Masyarakat sipil dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan
4. Edelman Polarisation barometer dan konsekuensinya untuk Transisi Energi di Indonesia

Pertama, kami akan membahas bagaimana kedekatan pandangan antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal mengenai transisi energi.

Diagram-diagram ini kami peroleh melalui analisis terhadap hasil FGD yang dilakukan oleh tim Yayasan Indonesia CeraH di 3 provinsi berbeda dapat dilihat variasi dari persepsi akan jalannya transisi. Dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan adalah provinsi yang bergantung pada pendapatan dari sektor ekonomi ekstraktif, termasuk batu bara. Sementara itu, Cirebon menjadi lokasi dari PLTU pertama yang akan dipensiunkan melalui skema ETM (*Energy Transition Mechanism*).

Beberapa pertanyaan dan jawaban yang dipertimbangkan dalam kedua diagram ini adalah pandangan yang dikemukakan terkait dengan transisi energi baik dalam hal nilai terpenting dari transisi energi (diagram 1), pemahaman mengenai transisi, strategi transisi, apa yang menjadi permasalahan, serta dampak dari transisi dan identifikasi pemangku kepentingan terkait transisi (diagram 2).

Diagram 1. cluster kedekatan pandangan mengenai nilai terpenting dari transisi berdasarkan hasil FGD:

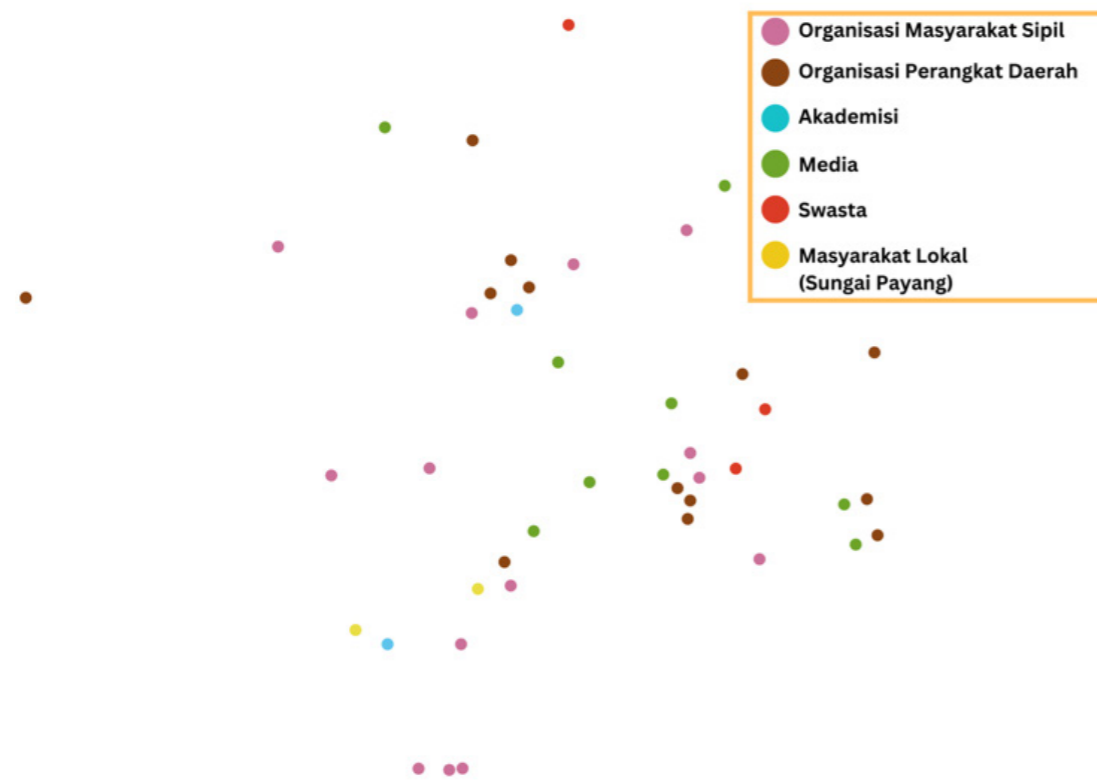
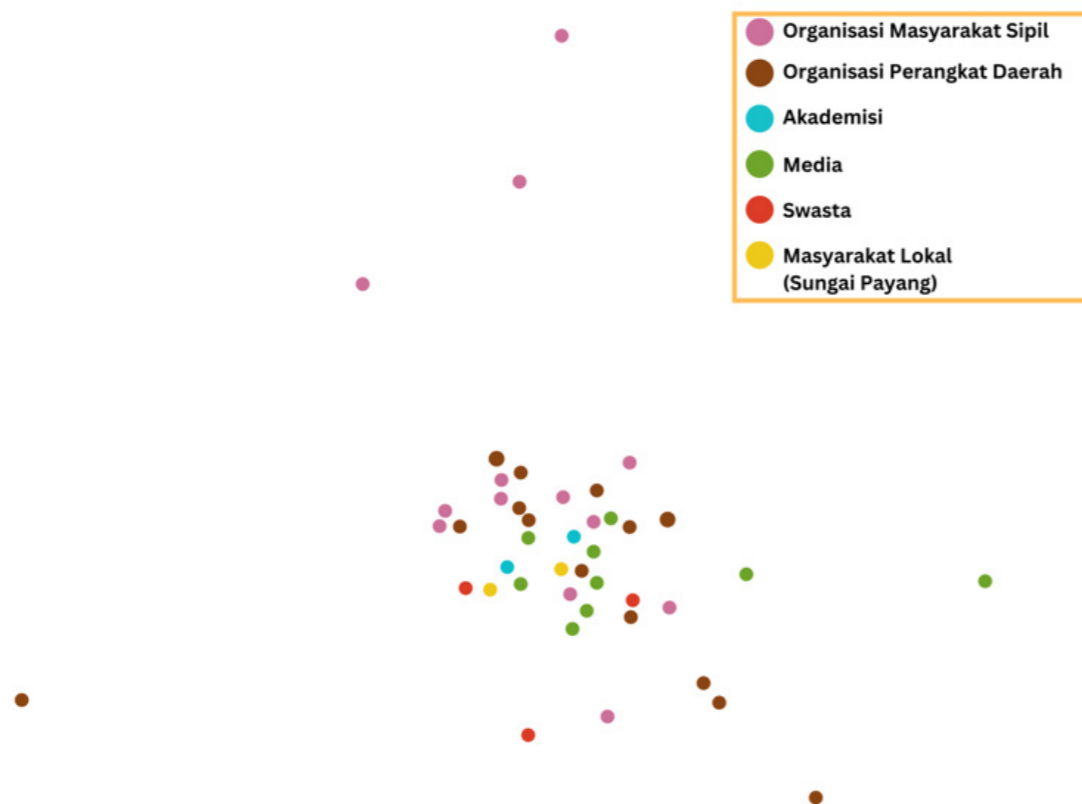


Diagram 2. cluster kedekatan pandangan mengenai transisi berdasarkan hasil keseluruhan FGD:



CSO dalam membayangkan transisi cenderung terbagi dalam perhatiannya terhadap dampak ekonomi dan lingkungan dari transisi, tergantung pada fokus dari CSO tersebut. Akan tetapi, perhatian masyarakat dominan pada dampak ekonomi dari transisi. Namun demikian, membagi kekhawatiran masyarakat sipil dan komunitas lokal sebagai polarisasi adalah hal yang kurang tepat. Dalam berbagai studi, ekonomi di tingkat komunitas lebih tepat dibayangkan sebagai kesatuan lanskap dan ekonomi, yaitu pencaharian (*livelihood*) (Toumbourou, Dressler, dan Werner, 2022). Dalam hal ini, ekspektasi masyarakat adalah pada kesatuan ekonomi dan lingkungan. Kecenderungan untuk khawatir terhadap kenaikan harga adalah respon terhadap ketidakpastian dari ekonomi lokal yang bergantung pada ekstraktivisme.

Beberapa informan di Kalimantan Timur misalnya, menyebut bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap tambang cenderung rendah karena tidak banyak masyarakat bekerja di sektor yang terkait langsung dengan tambang. Akan tetapi, dalam statistik BPS Kalimantan Timur misalnya, pendapatan PDRB terbesar di Kalimantan Timur berasal dari net ekspor yang sebagian besar berasal dari sumber daya alam berupa batu bara, minyak, dan gas bumi (BPS, 2023).

Sebab itu, di tingkat pemerintah daerah, ada kekhawatiran akan hilangnya net ekspor yang selama ini menjadi sumber terbesar dari PDRB di Kalimantan Timur dengan persentase mencapai lebih dari 50% PDRB di 6 kabupaten di Kalimantan Timur.

Dalam melihat dampak dari perusahaan tambang, di tingkat desa - pemerintah daerah - organisasi masyarakat sipil pun juga terdapat perbedaan yang berasal dari formasi ekonomi yang berbeda. Di satu sisi, ada ketergantungan pemerintah daerah dengan pajak dan DBH dari industri kotor. Di sisi lain, ada masyarakat lokal yang bahkan aksesnya terhadap layanan dasar kesehatan dan listrik masih belum memadai. Sementara itu, pencaharian dan lanskap di Kalimantan Timur tergerus, mendorong masyarakat untuk beralih padapenghasilan-penghasilan yang terkait dengan industri tambang. Di Sumatera Selatan Misalnya, salah seorang peserta FGD menggarisbawahi ini:

Contoh Muara Enim dan Lahat dulunya sektor pertanian, setelah masuk batu bara, mereka bertransisi secara tidak langsung, dipaksa karena lahan mereka terganggu oleh pertambangan dan penanggung batu bara. Mau tidak mau untuk mendapatkan perekonomian tambahan, mereka harus bekerja juga ditambang batu bara.

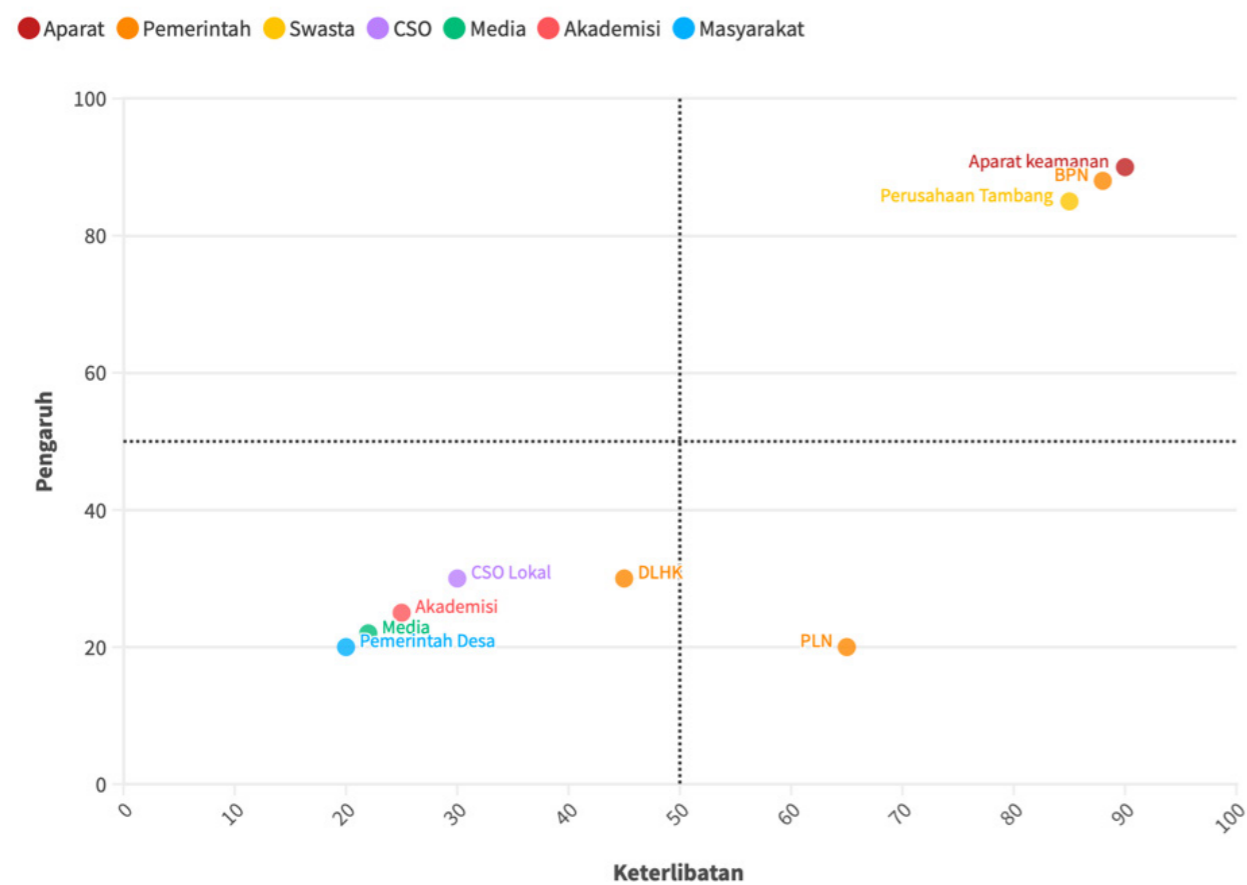
(Jurnal di Sumatera Selatan, 23 Agustus 2023)

Hal juga menegaskan posisi daerah-daerah peghasil tambang sebagai wilayah ekstraksi, yaitu zona-zona pendudukan yang kering (Li & Semedi, 2021). wilayah-wilayah ekstraktid menjadi kering karena nilai dan perputaran ekonominya terpusat di pusat-pusat modal, atau dalam hal ini adalah pusat-pusat industri lainnya yang memanfaatkan eksternalisasi dari dampak pertambangan.

Dalam kerangka industri ekstraktif dan ketimpangan akses serta infrastruktur yang menyertainya ini kemudian CSO dan warga setempat membayangkan “transisi

energi” dan dapat dilihat juga melalui hasil pemetaan aktor yang kami lakukan dengan masyarakat sipil (warga, CSO, Media, dan Akademisi) di Kalimantan Timur.

Diagram 3. Pemetaan Aktor di Kalimantan Timur



Sumber: ARC UI dan Yayasan Indonesia Cerah

Diagram ini adalah hasil dari penggalian pandangan dan pengalaman peserta FGD dari kelompok masyarakat sipil di Kalimantan Timur yang disertai dengan diskusi

mengenai siapa saja pemangku kepentingan terkait transisi energi serta bagaimana pengaruh dan keterlibatan mereka terkait permasalahan ini.

Tabel 4. Pengaruh dan Keterlibatan

No.	Aktor	Pengaruh	Keterlibatan	Deskripsi
1	Aparat keamanan	Kuat	Tinggi	Aparat Keamanan memiliki pengaruh dan keterlibatan tinggi sebagai pihak yang melakukan pengamanan di wilayah infrastruktur energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
2	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Kuat	Tinggi	BPN berperan dalam penyelesaian kasus perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang terhadap masyarakat lokal.
3	Perusahaan Tambang	Kuat	Tinggi	Perusahaan tambang ini memiliki pengaruh yang kuat dan keterlibatan yang tinggi dikarenakan wilayah tambang mereka serta pengaruh ekonomi dan politiknya hampir ada di seluruh Kutai Kartanegara.
4	PLN	Rendah	Sedang	PLN sebagai pembeli tidak terlalu mencampuri perusahaan tambang. Keterlibatan PLN juga hanya sebatas pengamanan pasokan batu bara.
5	CSO Lokal	Rendah	Sedang	CSO tidak dapat memengaruhi kebijakan, akan tetapi kerap mendampingi masyarakat dalam menghadapi masalah terkait tambang batu bara.
6	Media	Rendah	Rendah	Media kerap memberitakan berita mengenai transisi dan juga kekerasan aparat, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang tegas dari pemerintah daerah maupun pusat meskipun kerap menulis dan membahas isu pertambangan, akan tetapi tidak memiliki wewenang.

No.	Aktor	Pengaruh	Keterlibatan	Deskripsi
7	Akademisi	Rendah	Rendah	Akademisi dinilai kurang karena meskipun kerap menulis dan membahas isu pertambangan, akan tetapi tidak memiliki wewenang
8	Pemerintah Desa	Rendah	Rendah	Pemerintah desa dinilai masyarakat tidak berdaya ketika berhadapan dengan aparat, pemerintah desa, dan pihak perusahaan. Pemerintah desa kerap gagal ketika melakukan negosiasi dan dinilai tidak memiliki kekuatan untuk menegosiasikan persoalan yang sudah diputuskan oleh pihak luar desa yang memiliki kuasa lebih.
9	DLHK	Rendah	Rendah	Meskipun banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang batubara di Kaltim, tetapi DLHK Kaltim seakan-akan tidak memiliki wewenang atau kebijakan untuk memberikan solusi pada permasalahan tersebut.

Masyarakat sipil di Kalimantan timur melihat masalah energi sebagai masalah konflik di titik ekstraksi. Oleh sebab itu, faktor yang menentukan suatu entitas menjadi pemain penting dalam infrastruktur energi di Kalimantan Timur adalah pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan pemodal dan memiliki kuasa untuk membentuk praktik di lapangan. Hal ini tidak lepas dari politik dan ekonomi energi di tingkat lokal dan nasional di mana pemilik modal mendominasi (Ordenez dkk, 2022).

Hasil analisis kami menunjukkan bahwa narasi dominan yang dibentuk di media

sosial dominan dibangun oleh CSO, aktor swasta, dan pemerintah, di mana ketiganya juga dapat dilihat sebagai aktor yang memiliki kepentingan paling tinggi dalam memengaruhi kebijakan energi.

Dari temuan lapangan kami, dalam persepsi masyarakat, pengaruh atau kuasa dibentuk melalui kelindan dari modal dan kemampuan memobilisasi kekuatan di lapangan. Perbedaan posisi dan konflik ini tidak didasari oleh pertentangan antar ide, melainkan kepentingan untuk melanjutkan bisnis, dalam bentuk struktur insentif (Aspinall & Berenschot, 2019)

Temuan ini menarik karena dalam persepsi masyarakat di Kalimantan Timur, PLN justru tidak memiliki peran signifikan. Hal ini karena dalam memahami energi, masyarakat di Kalimantan Timur melihatnya dalam bentuk batu bara dan infrastruktur yang menyertainya yang secara langsung berdampak pada pencaharian. dalam sejumlah studi, perubahan pencaharian memang dirasakan sebagai perubahan paling awal yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari masuknya perusahaan yang membawa rezim kerja dan pengaturan pencaharian yang baru (Li & Semedi, 2021; Toumbourou, Dressler, dan Werner, 2021).

Analisis lebih lanjut diperlukan untuk dapat memetakan sejauh mana jaringan sosial dan jaringan bisnis ini turut mempengaruhi

kebijakan energi pada berbagai tingkatan pengambilan kebijakan di Indonesia. Perlu diingat juga bahwa peta dan tabel ini tidak menggambarkan sejauh mana peran aktual dari aktor, melainkan bagaimana masyarakat sipil memosisikan isu energi dan bagaimana mereka memahami aktor-aktor terkait.

Untuk itu, kami juga melakukan pemetaan terkait isu-isu strategis untuk memahami lebih jauh bagaimana isu transisi energi diposisikan oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal (tabel 5 dan 7) dan bagaimana hal ini dipahami di tingkat pusat (Tabel 6).

Tabel 5. Pemetaan Isu Strategis di Kalimantan Timur

Cakupan Tema	Isu
Masalah Regulasi	Monopoli PLN
	Kebijakan belum menyeluruh
	Pemerintah belum fokus
	Kebijakan tidak sinkron
	Ketergantungan dengan batu bara
	Sulit menindak
Sosial	Konflik kepentingan
	Politisasi isu energi
	Pemalsuan Amdal
	Kompensasi tidak sesuai
	Kekerasan Aparat dan Pemerintah
	Konflik lahan
Infrastruktur	Ekonomi pasca tambang
	Tidak merata
Lingkungan	Infrastruktur rusak
	Rehabilitasi pasca tambang
	Dampak lingkungan proyek energi



Deskripsi Isu

Market Structure PLN

Monopoli PLN atas listrik di Indonesia dinilai menghambat persaingan, yang berpotensi membatasi inovasi dan efisiensi dalam sektor energi. Posisi monopoli dapat menunda insentif PLN untuk memodernisasi dan mengintegrasikan praktik energi yang lebih berkelanjutan karena kurangnya tekanan kompetitif.

Kebijakan belum menyeluruh

Kebijakan energi yang terfragmentasi gagal menciptakan kerangka kerja yang kohesif untuk transisi ke sumber daya terbarukan, menghasilkan inisiatif yang terpotong-potong yang mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang dan membuat komitmen nasional maupun sub-nasional terhambat.

Pemerintah belum fokus

Meskipun sudah ada pencaanangan RUED dan rencana transisi energi, akan tetapi sejumlah pemangku kepentingan di

Kalimantan Timur merasa pelaksanaannya belum siap dan masih dipenuhi keraguan. Misalnya adalah beban anggaran operasional dan pegawai yang belum diimbangi dengan pelaksanaan dan dampak langsung dari program.

Kebijakan tidak sinkron

Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mempercepat transisi ke energi baru dan terbarukan. Namun, kondisi aktual yang terjadi menunjukkan penambahan jumlah pembangkit listrik tenaga uap. Apalagi, mengutip dari CNBC Indonesia (5 Oktober 2023), saat ini permintaan batubara masih terus meningkat. Sementara itu, menurut peserta FGD, sejumlah perusahaan batubara justru berencana untuk menggenjot produksi, yang juga berarti permintaan terhadap batu bara masih bertahan.

Ketergantungan pada batu bara

Pendapatan asli daerah terbesar di Kalimantan Timur masih berasal dari pajak kendaraan bermotor dan industri batubara. Beberapa pemangku kepentingan

kemudian menyarankan agar pemerintah sebaiknya fokus pada pemerataan akses listrik sebelum membahas transisi energi.

Potensi Konflik Kepentingan

Melihat kedepannya, perlu kehati-hatian. Jangan sampai nanti persoalan transisi energi ini menjadi monopoli pemerintah. Perusda menguasai mobil listrik BUMN (dikuasai oleh 1 orang saja) atau perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana dari APBD atau APBN. Untuk memitigasi ini, harusnya negara memberikan peluang bagi masyarakat agar dapat berperan juga dalam masa transisi energi ini. Negara membuka ruang-ruang bagi masyarakat, apakah itu nanti berupa subsidi ataupun kebijakan yang mengatur hal tersebut.

Politisasi Isu Energi

Politisasi isu energi dapat memiringkan pengembangan energi ke arah keuntungan jangka pendek, mengabaikan konsekuensi jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Pemalsuan Amdal

Masalah pemalsuan Amdal sering kali terjadi, di mana dokumen-dokumen penting yang seharusnya menggambarkan potensi dampak lingkungan dari sebuah proyek dibuat secara tidak sah atau dimanipulasi untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Dokumen Amdal kerap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan

Kompensasi tidak sesuai

Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pemilik lahan tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari tanah atau kerugian yang mereka derita akibat pembangunan proyek energi, baik itu proyek terbarukan maupun konvensional.

Kekerasan Aparat dan Pemerintah yang berpihak pada kepentingan pemodal

Hal ini menjadi keresahan bagi kelompok masyarakat sipil dan masyarakat sekitar, terutama mereka yang mengalami langsung intimidasi dan perampasan lahan yang disokong oleh kombinasi keterlibatan ormas dan aparat keamanan.

Tentu keterlibatan ormas, aparat penegak hukum membackup preman-preman ini dapat beroperasi dimanapun tanpa izin. Di kebun-kebun warga yang dirampas secara paksa. (Masyarakat sipil)

Konflik Lahan

Konflik lahan sering terjadi ketika ada persaingan atau klaim yang bertentangan atas hak penggunaan lahan antara perusahaan energi, pemerintah, dan komunitas setempat, khususnya di area yang direncanakan untuk pengembangan proyek energi atau tambang.

Infrastruktur tidak merata

Infrastruktur energi dan konektivitas di Kalimantan Timur hingga saat ini masih belum merata, termasuk di sejumlah pemukiman yang berada di dekat tambang namun belum memiliki akses listrik PLN.

Infrastruktur rusak karena aktivitas pertambangan

Infrastruktur jalan di Kalimantan Timur kerap menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah maupun masyarakat karena sering mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan

Sulit melakukan penindakan

Penegakan hukum yang lemah atau kurangnya sumber daya dan kapasitas pemerintah seringkali membuatnya sulit untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum lingkungan atau pelanggaran peraturan oleh perusahaan-perusahaan energi. Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah semakin kesulitan karena tidak lagi memiliki wewenang terkait pertambangan.

Rehabilitasi pasca tambang

Tanggung jawab untuk rehabilitasi area tambang setelah penutupan sering tidak dijalankan dengan baik, menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang dan membebani komunitas setempat dengan kondisi tanah dan air yang tidak sehat.

Ekonomi pasca tambang

Ekonomi lokal yang sebelumnya bergantung pada kegiatan pertambangan sering mengalami kemerosotan setelah tambang ditutup, tanpa adanya rencana yang solid untuk diversifikasi atau pembangunan ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Hal ini diperburuk oleh beralihnya formasi ekonomi, pencaharian, dan tenurial yang mendorong warga sekitar untuk bergantung pada aktivitas tambang.

Dampak lingkungan proyek energi

Proyek-proyek energi, baik terbarukan maupun konvensional, dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan kerap tidak dipertimbangkan dan direncanakan mitigasi ekonomi dan lingkungannya dengan matang.

Untuk itu, Kami juga melakukan analisis mengenai perbedaan pandangan dari pemerintah pusat dengan perhatian dari para pemangku kepentingan di tingkat lokal yang mengikuti FGD yang kami lakukan. Untuk representasi dari isu-isu strategis yang diidentifikasi oleh pemerintah pusat, kami menggunakan laporan kementerian ESDM dengan IRENA terkait kendala transisi. Kami membandingkan dua pandangan terkait isu ini untuk melihat potensi masalah yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait transisi energi.

Tabel 6. Isu strategis yang dikenali oleh laporan ESDM - IRENA¹⁴

Masalah	Masalah	Solusi
Kesiapan Sistem Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemi COVID-19 • Dana yang tidak memadai • Tantangan regulasi dalam beralih ke energi terbarukan • Menyesuaikan regulasi dan manufaktur lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan kondisi yang setara untuk sumber daya energi terbarukan • Mereformasi desain pasar listrik di Indonesia • Manfaatkan peluang jangka panjang dari transisi energi dengan program pemulihan hijau yang jelas
Kerangka Regulasi	Kebijakan yang lebih jelas diperlukan untuk mendorong lelang energi terbarukan, dan pembelian energi oleh korporasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan proses pengadaan • Kerangka regulasi yang jelas dengan lelang energi terbarukan yang efektif dan mekanisme Tarif Masuk (FiT) yang berfungsi baik • Solusi untuk menciptakan pasar energi terbarukan yang terdistribusi • Manfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pasar energi terbarukan baru
Kesiapan Penguasaan Teknologi Dan Infrastruktur	Keterbatasan kapasitas jaringan dan pentingnya publikasi RUPTL yang tepat waktu menegaskan kebutuhan untuk prediktabilitas investor dan perencanaan investasi yang sejalan dengan skema lelang yang ditingkatkan serta penempatan kapasitas angin dan surya yang mendukung sistem.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fleksibilitas sistem untuk integrasi energi terbarukan yang hemat biaya.
Pendanaan	Lembaga keuangan masih kesulitan dengan ketidakakraban dan risiko tinggi yang dirasakan dari proyek energi terbarukan, keterbatasan instrumen keuangan dan sumber daya yang cocok, serta kurangnya modal jangka panjang dari sumber lokal, yang mengakibatkan kesulitan bagi pengembang proyek dalam mengamankan pendanaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pembiayaan campuran, skema garansi, dan obligasi hijau diperlukan untuk mengurangi risiko dan menarik modal swasta, terutama untuk sistem off-grid.

¹⁴ IRENA (2022), Indonesia energy transition outlook, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Tabel 7. Isu yang diperoleh melalui FGD

Aktor	Kepentingan	Hambatan
Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Investasi Keberlanjutan bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> Dampak ekonomi pasca tambang Kesiapan sistem Kesiapan infrastruktur Harga energi tidak kompetitif Monopoli PLN
Media	<ul style="list-style-type: none"> Membuka ruang publik Menjaga kepentingan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Represi oleh negara Kekerasan oleh perusahaan Kepentingan industri kotor
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dana Bagi Hasil dari sektor energi Dampak ekonomi bagi daerah Pemanfaatan energi alternatif 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi yang tidak jelas Hilangnya kewenangan pemda Infrastruktur tidak merata
Organisasi Masyarakat Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan lingkungan Keadilan dari transisi berkeadilan Dampak terhadap masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Politisasi kebijakan energi Jebakan utang dan praktik neoliberal Kekerasan negara Dampak ekonomi Infrastruktur tidak merata Rehabilitasi pasca tambang Surplus listrik
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dampak ekonomi dari transisi energi Dampak terhadap mata pencaharian 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pelibatan publik Kekerasan negara Lepas tangannya negara terhadap dampak infrastruktur energi

Sumber: ARC UI dan Yayasan Indonesia Cerah

Masalah-masalah yang diidentifikasi oleh temuan FGD berfokus konteks sosio-ekonomi yang lebih luas, kepentingan pemangku kepentingan, dan sifat multisektor dari tantangan kebijakan energi dalam konteks Indonesia.

Masalah-masalah yang diidentifikasi oleh ESDM dan IRENA sementara itu berfokus pada kesiapan sistemik untuk transisi energi yang kadang kala tidak bersentuhan langsung dengan kekhawatiran dan aspirasi di tingkat masyarakat lokal maupun pemerintah daerah. Untuk persoalan regulasi misalnya, pemerintah pusat lebih menekankan pada penguatan regulasi untuk mekanisme pembelian listrik dan kurang membahas potensi konflik sosial dan dampak ekonomi terhadap ekonomi lokal. Padahal, struktur ekonomi dan pencaharian yang berpusat pada ekonomi ekstraktif baik dalam hal ekonomi fosil maupun yang tersentralisasi pada sejumlah pemodal cenderung merebut nilai dari sirkulasi lokal yang rawan membentuk *zona pendudukan* dan ekonomi lokal yang justru melemah (Li & Semedi, 2021).

Pemerintah perlu untuk membahas juga bagaimana kebijakan-kebijakan energi di tingkat makro dapat berpengaruh pada struktur ekologi, ekonomi, dan pencaharian yang mengalami rekonfigurasi selama transisi berlangsung. Hal ini juga yang kami tangkap sebagai kekhawatiran dari tiga daerah yang menjadi lokasi studi ini, baik dari kelompok media, OPD, maupun swasta dan masyarakat sipil.

Polarisasi dalam sektor energi mungkin terlihat tidak ada jika indikator polarisasi direduksi menjadi hal teknis, seperti yang dibahas oleh studi Edelman yang menempatkan polarisasi di Indonesia dalam kategori rendah. Dalam FGD yang kami lakukan, salah satu informan menyebutkan adanya ketimpangan pengetahuan yang tajam, dan membentuk polarisasinya sendiri. Perbedaan ini bukan hanya produk sampingan yang tidak disengaja tetapi fenomena yang sering kali dimobilisasi oleh elit dan kepentingan aktor swasta serta pemerintah. Di satu sisi, ada mereka yang memiliki akses ke layanan listrik dan energi yang kuat, seringkali difasilitasi oleh kedekatan dengan fasilitas penghasil energi. Di sisi lain, ada komunitas yang mengalami layanan listrik yang tidak andal, secara metaforis dan secara harfiah dibiarkan dalam kegelapan, karena lampu mereka “kelap-kelip.”

Pembagian yang timpang menyebabkan perasaan ketidakadilan di antara penduduk setempat, seperti yang diceritakan oleh seorang jurnalis dari Sumatera Selatan. Pemahaman masyarakat tentang energi terbatas pada pengalaman langsung mereka dengan listrik dan bahan bakar, tanpa pemahaman yang lebih luas tentang transisi energi yang sedang berlangsung. Mereka mempersepsikan distribusi pengetahuan dan manfaat yang tidak adil, mengamati kontras yang mencolok antara pasokan energi yang andal di daerah industri dan layanan yang tidak menentu di rumah mereka:

Nah faktanya di lapangan, Pak. Ini soal transisi energi itu bagaimana? Ini narasi apa lagi, kata masyarakat. Jadi untuk memahami energi di masyarakat kan hanya kenalnya listrik dan BBM, Pak. Dan mereka sampai hari ini ya tidak merasa adil juga dengan ini. Mereka di sebelah pabrik berjalan dengan bagus. Sementara lampu mereka kelap kelip. Siapapun Robin Hood yang membuat listrik, mereka akan terima. Nuklir pun akan diterima. Asal listriknya menyala. Jadi ada ketidakadilan pengetahuan. Itu menurut kami, terima kasih.

(Jurnal di Sumatera Selatan, 23 Agustus 2023)

Masyarakat saat ini menunjukkan pragmatisme yang mencolok terhadap sumber energi; ada kecenderungan kurang peduli mengenai asal usul listrik, yang mencerminkan ketimpangan pengetahuan dan kuasa di tingkat masyarakat. Fenomena ini, seperti yang diungkap oleh Jeong et al. (2021), sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat yang bergantung pada konteks lokal mereka. Hari ini, konteks energi di Kalimantan Timur adalah sebagai titik ekstraksi di mana kekerasan-kekerasan ekstraktif berlangsung.

Di daerah yang dominan menjadi sumber material dari energi, tambang dan efek ikutannya adalah hal yang dominan diperhatikan. Di Jawa Barat, sejumlah organisasi masyarakat sipil menekankan penolakan kepada geothermal dan menekankan bahwa bukan sosialisasi yang diperlukan, melainkan pelibatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor yang setara:

Tadi saya dengar bahwa yang diperlukan adalah sosialisasi, edukasi, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa masyarakat itu perlu sosialisasi dan masyarakat tidak mengerti. Misalnya kayak kemarin ada penolakan terhadap Chevron, terhadap Geothermal. Itu kan mengandaikan bahwa masyarakat menolak itu karena nggak ngerti. Bukan. Masyarakat menolak itu karena ngerti

(Jabar - Masyarakat Sipil)

Di Sumatera Selatan, efek jangka panjang dari perubahan lanskap dan pencaharian tampak paling terasa, termasuk tren untuk memanfaatkan biomassa dan tak lepas dari ekonomi perkebunan yang berkelindan dengan ekonomi ekstraktif lainnya (Toumbourou, Dressler, dan Werner, 2022). Terutama di Sumatera, ekonomi ekstraktif berbasis perkebunan juga mendominasi sejak masa kolonial (Stoler, 1995), berbeda dengan Kalimantan Timur yang ekonomi ekstraktifnya dimulai dengan hasil tambang berupa batu bara (1840an di Pengaron, sekarang Kalimantan Selatan) dan minyak bumi (1890an di Balikpapan dan Tarakan). Barulah kemudian pada dekade 1960-1970an perkebunan beragam komoditas dan *logging* bertumbuh sebelum disusul oleh kelapa sawit (Sellato, 2001 & Toumbourou, Dressler, dan Werner, 2022)

Kami baru satu bulan keliling, bagaimana perubahan dari panas ini ke Kampung Narung, ke daerah-daerah Rawa, persoalan utama mereka tuh ternyata bukan kebakaran melainkan makan, minum, dan kenapa? karena banyak rawa yang berubah fungsi, banyak hutan berubah fungsi, kenapa misalnya biomassa itu meresahkan Ibu.

Biomassa itu kan terus saya baca kemarin kan targetnya sekian juta ton kayu hutan mana lagi yang akan dihabisi.

(Jurnal di Sumatera Selatan, 23 Agustus 2023)

Sementara itu pemerintah daerah di Jawa Barat juga tengah menegosiasikan besaran DBH yang menjadi keresahan di ketiga wilayah studi.

Polarisasi yang termanifestasi dalam bentuk lain

Studi yang dilakukan Edelman Trust pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat polarisasi yang minim. Menurut analisis kami, persepsi rendah mengenai polarisasi ini justru mengindikasikan adanya penguatan konsolidasi antara elit dan oligarki dalam beberapa tahun terakhir (Diprose, McRae, dan Hadiz, 2019). Hal serupa dapat dilihat dalam kebijakan transisi, di mana banyak pemodal besar yang telah memastikan kelangsungan bisnis mereka melalui proses hilirisasi (Putra, 2022) dan juga di sektor pembangkitan energi serta industri ramah lingkungan (Sianturi, 2022).

Dalam analisis stakeholder mapping ini, kami melihat bahwa berbagai kepentingan yang berbeda di tingkat pemerintah pusat dan daerah tidak menghasilkan polarisasi. Sejalan dengan analisis media sosial kami, pemerintah daerah baik di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, maupun Jawa Barat mengeluhkan perihal regulasi yang belum jelas, terutama perihal peran daerah dan dana bagi hasil (DBH). Akan tetapi, untuk sementara waktu, pemerintah daerah juga tengah berupaya untuk mencari pendanaan

alternatif dan pengembangan energi alternatif seperti *co-firing* dan pengelolaan sampah di Kalimantan Timur, renegotiasi DBH dan geothermal di Jawa Barat, serta rencana diversifikasi energi di Sumatera Selatan oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk menggali lebih dalam mengenai isu polarisasi dan dinamika lainnya, kami menyarankan bahwa analisis jaringan sosial yang lebih mendalam diperlukan. Kami melihat, meskipun tidak ada polarisasi yang nyata dalam diskursus publik, masih ada potensi untuk konflik kepentingan dan dinamika kekuasaan yang kompleks yang perlu dipahami dengan lebih baik melalui penelitian lebih lanjut, untuk melihat kelindan elit dan sistematis serta struktur insentif yang mungkin menimbulkan konflik di lain hari seperti yang kini terjadi pada sejumlah proyek strategis nasional.





03. Kesimpulan dan Rekomendasi

Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana isu transisi energi berkembang di masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertama, kami telah menggambarkan sejauh apa polarisasi isu transisi energi terjadi di dalam media sosial. Berdasarkan analisis jejaring media sosial, kami menemukan terdapat tiga rumpun akun yang membentuk percakapan mengenai transisi energi di media sosial, yaitu akun-akun yang berafiliasi pada PT PLN, akun-akun tokoh publik dan institusi internasional, serta akun-akun media lokal dan organisasi masyarakat sipil internasional, nasional, dan lokal yang bertautan dengan gerakan transisi energi berkeadilan.

Selain itu, kami juga menemukan bahwa tidak terjadi polarisasi dalam percakapan mengenai transisi energi di media sosial di Indonesia. Percakapan tersebut lebih dipengaruhi oleh fenomena dan kesepakatan transnasional, ketimbang perkembangan di dalam negeri. Bagi kami, ini menandakan absennya dinamika nasional dan kemampuan aktor lokal untuk mempertahankan perhatian publik terhadap agenda transisi energi.

Dalam menggambarkan perkembangan isu transisi energi di masyarakat Indonesia, kami juga melakukan survei dengan responden orang-orang muda. Dari survei ini, kami menemukan bahwa kecemasan mengenai masa depan energi bersih belum diekspresikan secara politis ataupun tersasar pada kebijakan yang sesuai. Sebagian besar orang muda yang menjadi responden menunjukkan kecenderungan untuk sekedar mengikuti tren di media sosial dalam memahami agenda transisi energi.

Selain itu, kecemasan mengenai masa depan energi bersih juga terpusat pada isu polusi udara dan kendaraan listrik. Hal ini berarti bahwa imajinasi masa depan orang muda terbatas pada 1-5 tahun ketimbang beberapa dekade ke depan. Terlepas dari dukungan mereka terhadap peralihan dari energi kotor ke energi bersih, orang-orang muda yang disurvei menunjukkan kekhawatiran apabila transisi energi berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan akses terhadap energi dengan harga terjangkau.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kami mengajukan dua rekomendasi. Pertama, orang-orang muda perlu diberikan paparan lebih banyak dan peran lebih sentral untuk membangun energi berkeadilan. Kami berargumen bahwa orang-orang muda adalah aktor utama yang mampu menggerakkan narasi transisi energi berkeadilan di media sosial.

Kedua, pemangku kepentingan, akademisi, dan ilmuwan dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan jurnalisme sains untuk meningkatkan pengetahuan orang-orang muda mengenai energi kotor dan energi bersih, serta solusi material yang perlu diambil. Kolaborasi lintas aktor ini dapat memanfaatkan momen *trending issues*, seperti polusi udara yang meningkat dan advokasi PT PLN terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi di wilayah urban, untuk mengungkapkan pengetahuan, misalnya mengenai sumber energi dari baterai yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan listrik.

Referensi

- ADB. (2023). Energy Transition Mechanism. <https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm>
- Anam, K. (2022). Peluang & Tantangan Ekonomi Transisi Energi Mengemuka di B20. In CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220623174447-4-349814/peluang-tantangan-ekonomi-transisi-energi-mengemuka-di-b20>
- Arlt, D., Rauchfleisch, A., & Schäfer, M. S. (2019). Between fragmentation and dialogue. Twitter communities and political debate about the Swiss “nuclear withdrawal initiative”. *Environmental Communication*, 13(4), 440-456.
- Asia Research Centre Universitas Indonesia & Yayasan Indonesia Cerah. (2023, Juni). Kerangka Acuan Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus “Percepatan Transisi Energi di Kalimantan Timur: Peran Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Pelaku Usaha”.
- Binder, M. (2023, June). Twitter’s API keeps breaking, even for developers paying \$42,000”. In Mashable SE Asia. <https://sea.mashable.com/tech/24640/twitters-api-keeps-breaking-even-for-developers-paying-42000>
- D. Boyd, S. Golder and G. Lotan. (2010), Tweet, Tweet, Retweet: Conversational Aspects of Retweeting on Twitter. 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, Honolulu, HI, USA, 2010, pp. 1-10, doi: 10.1109/HICSS.2010.412.
- Camil, R., Attamimi, N. H., & Esti, K. (2017). Dibalik fenomena buzzer: Memahami lanskap industri dan pengaruh buzzer di Indonesia. *Centre for Innovation Policy and Governance*, 1(1), 1-30.
- Carmack, H. (Ed.) (2017). . (Vols. 1-4). SAGE Publications, Inc, <https://doi.org/10.4135/9781483381411>
- CNBC Indonesia (2023, Oktober). Produksi Batu Bara RI 81,67%, Hampir Tembus Target. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231005152649-4-478213/produksi-batu-bara-ri-8167-hampir-tembus-target>
- CNN Indonesia. (2021, November). Khawatir Ramai Harga Listrik Naik, Jokowi Cari Skema Transisi Energi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211122144821-532-724444/khawatir-ramai-harga-listrik-naik-jokowi-cari-skema-transisi-energi>
- CNN Indonesia. (2023, September). Polusi Makin Parah, Luhut Ingin Percepat Proyek Kendaraan Listrik. In CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230901184725-92-993655/polusi-makin-parah-luhut-ingin-percepat-proyek-kendaraan-listrik-ciera-group-dan-pt-hatfield-indonesia>. (2023, Juni). Laporan Final Pelingkupan SESA: Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) Mekanisme Transisi Energi (MTE) di Indonesia. Disusun untuk Asian Development Bank.
- Corlew, L. K., Keener, V., Finucane, M., Brewington, L., & Nunn-Crichton, R. (2015). Using social network analysis to assess communications and develop networking tools among climate change professionals across the Pacific Islands region. *Psychosocial Intervention*, 24(3), 133–146. <https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.07.004>
- Cunningham, R., Cvitanovic, C., Measham, T., Jacobs, B., Dowd, A.-M., & Harman, B. (2016). Engaging communities in climate adaptation: The potential of social networks. *Climate Policy*, 16(7), 894–908. <https://doi.org/10.1080/14693062.2015.1052955>
- Falkenberg, M., Galeazzi, A., Torricelli, M., Di Marco, N., Larosa, F., Sas, M., Mekacher, A., Pearce, W., Zollo, F., Quattrociochi, W., & Baronchelli, A. (2022). Growing polarization around climate change on social media. *Nature Climate Change*, 12(12), Article 12. <https://doi.org/10.1038/s41558-022-01527-x>
- Gladwin, D., & Ellis, N. (2023). Energy literacy: towards a conceptual framework for energy transition. *Environmental Education Research*, 1-15.
- Hadiz, V., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. 96 (Indonesia, Special Issue: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian), 35-57.
- Hovland, C. I., & Weiss, W. (1951). The influence of source credibility on communication effectiveness. *Public opinion quarterly*, 15(4), 635-650.
- IPCC. (2013). Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2013: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001
- Jeong, G. H., & Lowry, W. (2021). The polarisation of energy policy in the US Congress. *Journal of Public Policy*, 41(1), 17-41.
- Jobin-Leeds, G. (2016). *When we fight, we win: Twenty-first-century social movements and the activists that are transforming our world*. New York: New Press
- t. (2021). Kalimantan Timur Miliki PDRB sektor tambang tertinggi. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/19/kalimantan-timur-miliki-pdrb-sektor-tambang-tertinggi>
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: A systematic review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188–206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>
- Kusuma, Nazalea. (2023). What is Just Energy Transition Partnerships?. *Green Network*. <https://greennetwork.asia/news/what-is-just-energy-transition-partnerships/#:~:text=The%20IPG%20consists%20of%20Japan,as%20HSBC%20and%20Citi%20Bank>
- Kusumaningrum, S., Sari, W. L., Febrianto, R., Wandasari, W., Arifiani, S. D., & Pratama, G. (2023). *Mengenal Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Depok, Indonesia. PUSKAPA.
- Laville, S. & Watts, J. (2019). Across the globe, millions join biggest climate protest ever. <https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/21/across-the-globe-millions-join-biggest-climate-protest-ever>
- Lavrakas, P. J. (Ed.). (2008). *Encyclopedia of Survey Research Methods*. SAGE. DOI: <https://dx.doi.org/10.4135/9781412963947.n419>
- Ledford, H. (2023). Researchers scramble as Twitter plans to end free data access. <https://www.nature.com/articles/d41586-023-00460-z>
- Li, R., Crowe, J., Leifer, D., Zou, L., & Schoof, J. (2019). Beyond big data: Social media challenges and opportunities for understanding social perception of energy. *Energy Research & Social Science*, 56
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Loureiro, M. L., & Alló, M. (2020). Sensing climate change and energy issues: Sentiment and emotion analysis with social media in the UK and Spain. *Energy Policy*, 143
- Malm, A. (2016). *Fossil capital: The rise of steam power and the roots of global warming*. London & New York: Verso.
- Mare, A., Mabweazara, H. M., & Moyo, D. (2019). “Fake news” and cyber-propaganda in Sub-Saharan Africa: Recentering the research agenda. *African Journalism Studies*, 40(4), 1-12.
- Maurer, Jean-Luc (2021). Indonesia in ‘3D’: development, dictatorship and democracy. *Encouraging knowledge and enhancing the study of Asia* (88), 10-11
- Mongabay. (2023). Muara Enggelam Desa Role Model PLTS Komunal di Kalimantan Timur. <https://www.mongabay.co.id/2023/08/16/muara-enggelam-desa-role-model-plts-komunal-di-kalimantan-timur/>
- Mudhoffir, A. M. (2021). *Aktivisme Borjuis: Mengapa Kelas Menengah Reformis Gagal Mempertahankan Demokrasi*. Project Multatuli.
- Neuman, W. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson, Essex, UK.
- O’Brien, K., E. Selboe, and B. M. Hayward. (2018). Exploring youth activism on climate change: dutiful, disruptive, and dangerous dissent. *Ecology and Society* 23(3):42. <https://doi.org/10.5751/ES-10287-230342>

- Ordóñez, J. A., Jakob, M., Steckel, J. C., & Fünfgeld, A. (2022). Coal, power and coal-powered politics in Indonesia 1. In *The Political Economy of Coal* (pp. 281-299). Routledge.
- Pearce, W., Niederer, S., Özkula, S. M. & Sánchez Querubín, N. (2019). The social media life of climate change: platforms, publics, and future imaginaries. *WIREs Clim. Change* 10, e569 .
- Perdana, A.P. (2023, August). Struktur Pasar Kelistrikan Jadi Tantangan JETP. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/03/struktur-pasar-kelistrikan-indonesia-jadi-tantangan-implementasi-jetp>
- PLN. (2023, August). PLN Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik Guna Kurangi Polusi Udara. In Siaran Pers PLN. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/08/pln-dorong-penggunaan-kendaraan-listrik-guna-kurangi-polusi-udara>
- Rakhmani, I., & Saraswati, M. S. (2021). Authoritarian populism in Indonesia: The role of the political campaign industry in engineering consent and coercion. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 436-460.
- Rustiadi, E., Pribadi, D.O., Pravitasari, A.E., Indraprahasta, G.S., Iman, L.S. (2015). Jabodetabek Megacity: From City Development Toward Urban Complex Management System. In: Singh, R. (eds) *Urban Development Challenges, Risks and Resilience in Asian Mega Cities*. *Advances in Geographical and Environmental Sciences*. Springer, Tokyo. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55043-3_22
- Safrina, R., & Yurnaidi, Z. (2023, July). Social Media Analysis on ASEAN Energy Transition Trends. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1199, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.
- Sellato, B. (2000). *Forest, resources and people in Bulungan. Elements for a history of settlement, trade and social dynamics in Borneo*. CIFOR
- Stoler, A. L. (1995). *Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt, 1870-1979*. University of Michigan Press.
- Tempo.co. (2023, September). Satgas KLHK Awasi 32 Industri di Jabodetabek Diduga Sumber Polusi Udara. <https://metro.tempo.co/read/1770572/satgas-klhk-awasi-32-industri-di-jabodetabek-diduga-sumber-polusi-udara>
- Toumbourou, T. D., Dressler, W. H., & Werner, T. T. (2022). Plantations enabling mines: Incremental industrial extraction, social differentiation and livelihood change in East Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 119, 106157.
- Traction Energy Asia (2020). *Post-Election Political Analysis of Impacts on Land Use, Climate Action and Indigenous Rights in Indonesia: Extended Summary*
- We Are Social, Hootsuite, DataReportal. (2021). Breakdown of social media users by age and gender in Indonesia as of January 2021 [Graph]. In Statista. Retrieved September 11, 2023, from <https://www.statista.com/statistics/997297/indonesia-breakdown-social-media-users-age-gender/>
- Whitehead, J., & McNiff, J. (2006). *Action research: Living theory*. Sage.
- Wijaya, T. (2022). Conditioning a stable sustainability fix of 'ungreen' infrastructure in Indonesia: transitional alliances, compromise, and state's strategic selectivity. *The Pacific Review* 35:5. <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1884123>
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, (96), 11-33.
- Yunus, S.R. (2023, June). Cadangan Nikel Kritis, Warga Sultra Minim Rasakan Manfaat Tambang. In Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/08/cadangan-nikel-tersisa-55-tahun-daerah-justru-tak-rasakan-manfaat-signifikan>
- Yulianus, Jumarto. (2022). Kalimantan Poros Ekonomi Hijau. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/19/transformasi-ekonomi-jadikan-kalimantan-poros-pertumbuhan-ekonomi-hijau>
- Yunus, S.R., Theodora, A. (2023). Kemiskinan Naik di Sentra Pengolahan Nikel, Efek Ganda Hilirisasi Belum Optimal. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/21/warga-masih-hidup-miskin-hilirisasi-sisakan-pekerjaan-rumah-besar>
- Zilles, J., & Marg, S. (2022). Protest and polarisation in the context of energy transition and climate policy in Germany: Mindsets and collective identities. *German Politics*, 1-22.

